PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH
JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
PEKANBARU

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**
**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**
**DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU**
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pekanbaru, 17 Maret 2023

**INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU**,

PEMERINTAH PROVINSI INSPEKTORAT DAERAH RIAU

**SIGIT JULI HENDRIAWAN, SE,MM,CA,CRMP,QGIA**
Pembina Utama Muda
NIP 19710729 199302 1 003

Dipindai dengan CamScanner

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjiP) TAHUN 2022

## DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU

JL. CUT NYAK DIEN NO.6 PEKANBARU

disbun PROVINSI RIAU

disbun.riau.go.id
disbun@riau.go.id
@disbunriau

# KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai wujud pertanggungjawaban tertulis Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2022 atas tingkat capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sebagai langkah perbaikan yang berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja dan diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pendorong dan pendukung terwujudnya penyelengaraan tata pemerintah yang baik *(good governance*).

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat bermanfaat dan dijadikan perbaikan penyempurnaan proses perencanaan dan pelaksanaan dalam memberikan informasi akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Riau kedepan.

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2022 ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau serta sebagai bahan pedoman dalam peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Riau dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik, serta untuk memberikan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan instansi pemerintah selama satu tahun. Laporan kinerja disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Laporan kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2022 menyajikan laporan mengenai hasil- hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Terkait dengan hal tersebut, Laporan Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2022 bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Riau dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama tahun anggaran 2022.

Selain itu LKjIP tahun 2022 juga bertujuan untuk memberikan

umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan pembangunan perkebunan Provinsi Riau. Dengan disusunnya LKjIP Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2022 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
2. Mendorong Dinas Perkebunan Provinsi Riau didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perkebunan Provinsi Riau untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Perkebunan Provinsi Riau di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## 1.2 Struktur Organisasi

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perkebunan Provinsi Riau terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tanggal 16 September 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 64 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Pertanian sub urusan Perkebunan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Perkebunan berkeduduan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian

Susunan Organisasi Dinas Perkebunan, terdiri dari :

a. Sekretariat, terdiri dari Subbagian Kepegawaian dan Umum;

b. Bidang Produksi Perkebunan;

c. Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan;

d. Bidang Sarana dan Prasarana;

e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

g. 2 Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Sedangkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor : 47 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan Provinsi Riau, didalam Peraturan Gubernur Riau tersebut dinyatakan bahwa UPT Dinas Perkebunan Provinsi Riau sebagai berikut :

1) UPT Produksi Benih Perkebunan (Kelas A);
2) UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan (Kelas A);

Adapun gambar struktur organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Riau sebagai berikut :

Gambar 1
Struktur Organisasi beserta Pemangku Jabatan
Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2022

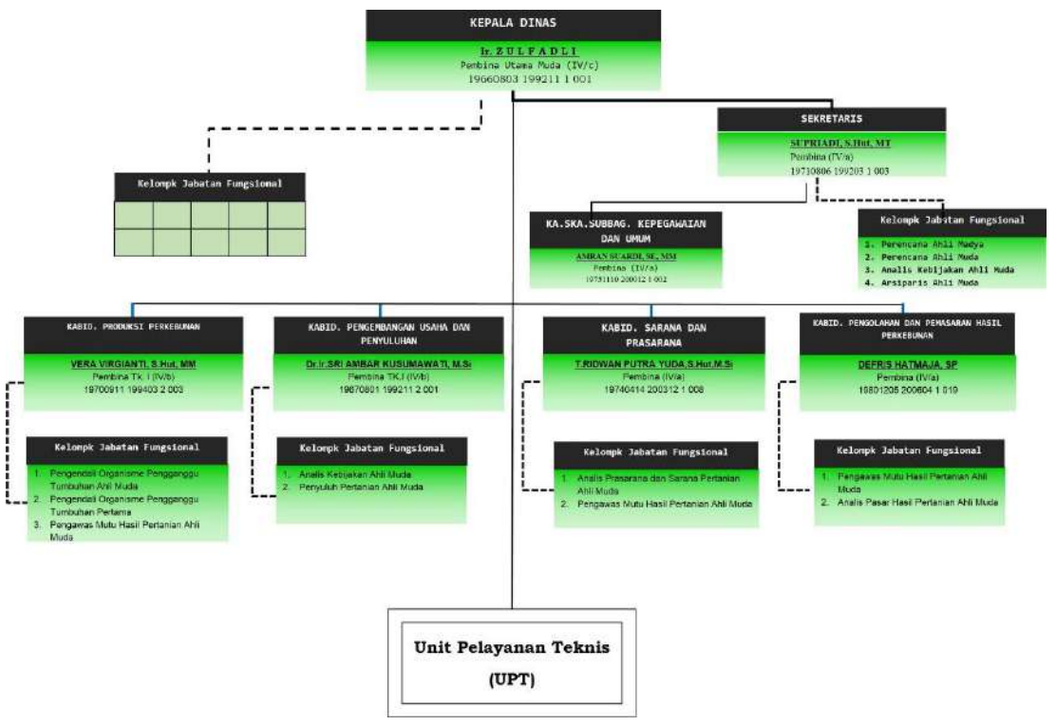

Susunan Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Riau terdiri dari:

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, terdiri dari:

1). Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

2). Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :

a. Fungsional Perencanaan Muda
b. Fungsional Perencana Ahli Madya
c. Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda
d. Fungsional Arsiparis Ahli Muda

c. Bidang Produksi, terdiri dari:

1). Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :

a. Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda
b. Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama
c. Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda

d. Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan, terdiri dari:

1). Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :

a. Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda
b. Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Muda

e. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri dari:

1). Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :

a. Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda

f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, terdiri dari:

1). Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :

a. Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda
b. Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda

g. UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan terdiri atas:

1). Kepala UPT

2). Subbagian Tata Usaha

3). Seksi Produksi Benih Tanaman Tahunan

4). Seksi Produksi Benih Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar

5). Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun gambar struktur organisasi UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Riau sebagai berikut :

Gambar 2
Struktur Organisasi UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan
beserta Pemangku Jabatan Tahun 2022

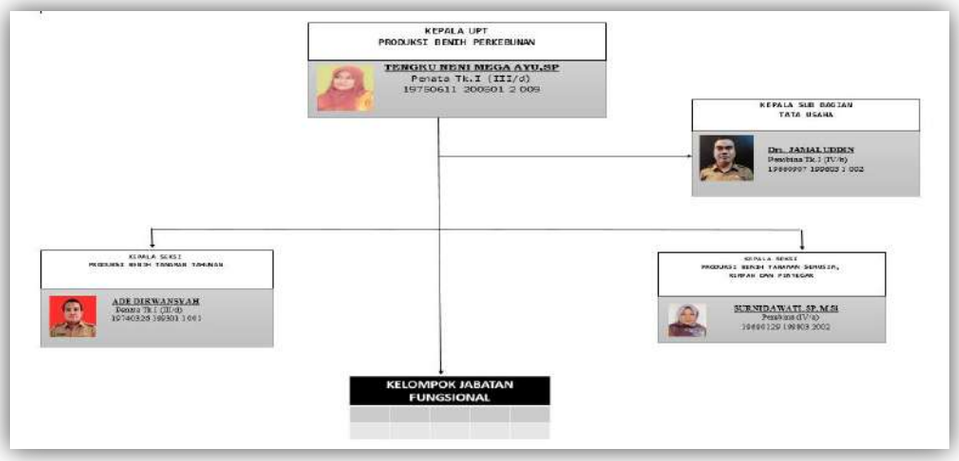


h. UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan, terdiri atas:

1). Kepala UPT

2). Subbagian Tata Usaha

3). Seksi Pengawasan dan Peredaran Benih

4). Seksi Pengujian Mutu dan Sertifikasi Benih

5). Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun gambar struktur organisasi UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Riau sebagai berikut :

Gambar 3
Struktur Organisasi UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan
beserta Pemangku Jabatan Tahun 2022

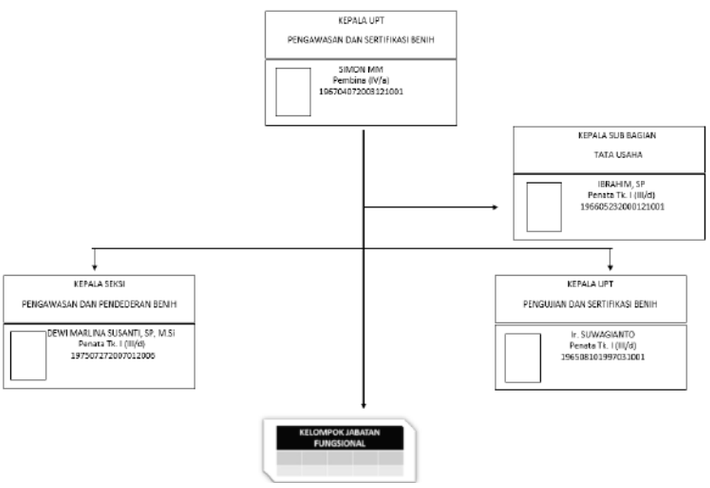

## 1.3 Tugas dan Fungsi

Dinas Perkebunan Provinsi Riau mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam pasal 292 sampai dengan pasal 301 Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan perumusan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan fungsi lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

Dinas Perkebunan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Produksi Perkebunan, Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan, Bidang Saranan dan Prasarana, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
b. Pelaksanaan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Produksi Perkebunan, Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan, Bidang Saranan dan Prasarana, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Produksi Perkebunan, Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan, Bidang Saranan dan Prasarana, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
d. Pelaksanaan administrasi Kesekretariatan, Bidang Produksi Perkebunan, Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan, Bidang Saranan dan Prasarana, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 1.4. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) ORGANISASI

### Kepegawaian

#### a. Jumlah Pegawai

Dalam mendukung tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh masing-masing unit kerja pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau, maka telah ditempatkan para petugas dengan uraian pada tabel 1

dan Tabel 2

Tabel 1.
Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Riau
Tahun 2022.

| No | Unit Kerja Dinas | jumlah Aparatur | | | | | | | | jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | struktural | | fungsional umum | | fungsional tertentu | | honorer | | |
| | | L | P | L | P | L | P | L | P | |
| 1 | Kepala Dinas/Sekretariat/Bidang | 5 | 2 | 42 | 21 | 11 | 7 | 28 | 20 | 136 |
| 2 | UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 |
| **Jumlah** | | **10** | **5** | **46** | **21** | **13** | **8** | **33** | **21** | **157** |

Ket : Kondisi Desember 2022

Dari tabel 2.1 yaitu Jumlah Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Riau tahun 2020 dapat diketahui bahwa jumlah ASN sebanyak 103 orang yang terdiri dari aparatur struktural sebanyak 15 orang dengan rincian 10 lak-laki dan 5 perempuan, fungsional umum 67 orang dengan rincian 46 lak-laki dan 21 perempuan, dan fungsional tertentu 21 orang dengan rincian 13 laki-laki dan 8 perempuan serta pegawai honorer/tidak tetap 54 orang dengan rincian 33 lak-laki dan 21 perempuan

**b. Kualifikasi Pendidikan**

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Riau secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2022
Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Riau

| No | Unit Kerja Dinas | Pegawai | | honorer | | Jumlah | | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | P | L | P | L | P | L | P |
| 1 | Strata 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,64 |
| 2 | Strata 2 | 23 | 9 | 3 | 0 | 26 | 9 | 16.64 | 5.76 |
| 3 | Strata 1 | 34 | 24 | 16 | 16 | 50 | 40 | 32 | 25.6 |
| 4 | Diploma (1-4) | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2.56 | 0.64 |
| 5 | SMA/SMK/MA | 8 | 2 | 12 | 4 | 20 | 6 | 12.8 | 3.84 |
| 6 | SMP/MTs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| **total** | | **67** | **36** | **33** | **21** | **100** | **57** | | |

Ket : Kondisi Desember 2022

Sedangkan berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2022 dapat diketahui bahwa persentase pendidikan aparatur laki-laki pada umumnya lebih tinggi dari pada perempuan, namun tingkat pendidikan perempuan pada strata S3 perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki. Dinas Perkebunan tidak memiliki aparatur dan pegawai honorer yang berstatus tingkat pendidikan setingkat SMP/MTs dan SD.

**c. *Pangkat dan Golongan***

Sedangkan berdasarkan pangkat dan golongan, pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Riau secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3 berikut :

Tabel 3.
Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2022
Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perkebunan Provinsi Riau

| No | Pangkat/Golongan | Jumlah | | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | L | P | L | P |
| 1 | IV/d | 1 | 0 | 0.97 | - |
| 2 | IV/c | 1 | 0 | 0.97 | - |
| 3 | Pembina/IV b | 9 | 3 | 8.73 | 2.91 |
| 4 | Pembina/IV a | 14 | 6 | 13.58 | 5.82 |
| 5 | Penata Tingkat I/ III d | 16 | 16 | 15.52 | 15.52 |
| 6 | Penata/III c | 7 | 4 | 6,79 | 3.88 |
| 7 | Penata Muda Tingkat I/ III b | 7 | 4 | 6,79 | 3.88 |
| 8 | Penata Muda/ III a | 5 | 3 | 4.85 | 2.91 |
| 9 | Pengatur Tingkat I/ II d | 1 | 0 | 0.97 | - |
| 10 | Pengatur/ II c | 5 | 0 | 4.85 | - |
| 11 | Pengatur Muda Tingkat I / II b | 1 | 0 | 0.97 | - |
| 12 | Pengatur Muda/ II a | 0 | 0 | - | - |
| **Jumlah** | | **67** | **36** | **64.99** | **34.92** |

Untuk Tabel 2.3 yaitu tabel berdasarkan Pangkat/ Golongan Tahun 2022, dapat diketahui bahwa persentase Pangkat/Golongan aparatur laki-laki pada umumnya lebih tinggi dari pada perempuan, dan jumlah ASN laki-laki lebih banyak dari pada ASN Perempuan dengan rincian 64,99 % aparatur laki-laki dan 34,92 % aparatur perempuan

## 1.5 SARANA DAN PRASARANA

Selain dukungan sumber daya aparatur, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Riau juga didukung oleh sumber daya aset/modal yang memadai. Kondisi aset/modal yang dimiliki saat ini disajikan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4
Data Aset/Modal Pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau

| No | Jenis Aset | Jumlah | Kondisi | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Baik | Rusak/Jelek |
| 1 | Gedung Kantor | 9 | 4 | 5 |
| 2 | Gedung Kantor Lain | 1 | 1 | - |
| 3 | Bangunan Gudang | 3 | 3 | - |
| 4 | Aula | 1 | 1 | - |
| 5 | Ruang Rapat | 3 | 3 | - |
| 6 | Kendaraan Dinas Jabatan roda 4 | 8 | 8 | - |
| 7 | Kendaraan Dinas Operasional roda 4 | 7 | 6 | 1 |
| 8 | Kendaraan Operasional Roda 2 | 4 | 4 | - |
| 9 | Komputer PC | 86 | 81 | 5 |
| 10 | Note Book | 10 | 9 | 1 |
| 11 | Mesin Fotocopy | 3 | 3 | - |

*Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2022*

## 1.6 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam rangka mewujudkan peran strategis Dinas Perkebunan Provinsi Riau sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah tertuang dalam Renstra, maka hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan tanaman perkebunan antara lain sebagai berikut:

1. Karekteristik lahan, kondisi fisik kimia tanah, ketersediaan dan suplai air, aspek topografi, geomorfologi, pola hidrologi maupun aksesibilitas menjadi faktor yang perlu diperhitungkan untuk merancang kawasan.
2. Penanganan budidaya dan produksi serta tata kelola teknologi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
3. Penanganan pasca panen dan aplikasi teknologi pasca panen yang ramah lingkungan jika tidak diterapkan akan berdampak pada menurunnya mutu, rendahnya nilai jual, turunnya nilai kompetitif
4. Layanan pengaturan ekosistem melalui optimalisasi pemanfaatan lahan dan pengaturan pola tanam

5. Layanan kultural melalui aplikasi pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat dalam mengelola SDA
6. Penggunaan lahan sesuai dengan jenis peruntukan lahan, potensi SDA yang tersedia dan SDM yang terlibat
7. Efisiensi dalam pengadaan produk pendukung (pupuk, pestisida, benih), teknologi infrastruktur pendukung (alat/mekanisasi), SDA pendukung (air, media tanah) yang akan diterapkan
8. Pemanfaatan lahan untuk kegiatan perkebunan akan membentuk ekosistem buatan, terjadinya perubahan ekosistem alami secara terus menerus berdampak pada meningkatnya kerentanan ekosistem, dan kondisi ini mempengaruhi tingkat adaptasi terhadap perubahan iklim.
9. Pola budidaya monokultur ditinjau dari aspek keseimbangan ekosistem akan mengancam keanekaragaman hayati.

## 1.7 PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan yang menjadi isu strategis pada Dinas Perkebunan adalah :

1) Produksi komoditas utama perkebunan belum optimal

Ini disebabkan antara lain :

a. Masih rendahnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan

Rendahnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan, banyak faktor yang penyebabnya, antara lain sebagai berikut :

- Kebun dengan kondisi tanaman tua dan rusak (TTR) cukup luas;
- Belum optimalnya penggunaan benih unggul bermutu/bersertifikat
- Penggunaan benih bermutu, pola dan jarak tanam, pengendalian Hama penyakit serta pemupukan juga masih rendah.
- Belum terpenuhinya standar sarana produksi lainnya

  Kondisi sebagian sarana dan prasarana perkebunan juga masih jauh dari yang diharapkan, baik berupa alat mesin pertanian maupun sarana pengairan serta jalan produksi kebun. Kondisi jalan produksi di perkebunan belum memadai

sehingga menyebabkan ongkos angkut hasil panen perkebunan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi.

- Belum terpenuhinya standar populasi tanaman per hektar;
- Penerapan teknologi baik teknologi budidaya maupun panen dan pasca panen juga masih rendah, secara keseluruhan baru sekitar 60% dari anjuran yang ditetapkan.
- Pengendalian OPT belum dilakukan secara terpadu dan ramah lingkungan;
- Dukungan penerapan teknologi budidaya yang rendah;
- Perubahan iklim.
- Akses petani terhadap permodalan masih terbatas

b. Kapasitas dan Profesionalisme SDM aparatur belum memadai

Petani merupakan SDM penting dalam pembangunan pertanian dan perkebunan, sehingga kemampuan SDM petani akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau capaian hasil pembangunan. Petani perkebunan secara umum didominasi oleh kaum tua dan dari kaum ibu-ibu, juga dengan pendidikan formal yang sangat rendah, hal ini membuat sulitnya dalam transformasi teknologi. Masih rendahnya SDM pertanian ± 80% yang berusaha tani tamat SD ke bawah. Sebagai akibat dari hal tersebut adalah bahwa petani lebih banyak diposisikan sebagai objek pembangunan daripada petani sebagai pelaksana pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut maka kedepan peningkatan kapasitas petani sebagai unsur penting dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan.

c. Tingginya perubahan komoditas non kelapa sawit menjadi kelapa sawit, hal ini disebabkan antara lain karena menurunya potensi lahan produktif dan belum optimalnya pemanfaatan lahan dan pengaturan pola tanam (diversifikasi)

2. Masih rendahnya mutu produk komoditas utama perkebunan, hal ini disebabkan karena Penanganan pasca panen yang belum optimal (*Good Handling Practices*/GHP). Belum optimalnya penanganan pasca panen disebabkan antara lain :

- Masih kurangnya sarana pendukung pasca panen dan aplikasi teknologi pasca panen
- Masih kurangnya SDM pasca panen dalam peningkatan mutu produk

3. Belum optimalnya kinerja perkebunan dalam menyumbang penerimaan daerah, hal ini disebabkan
   a. Belum optimalnya pendataan pelaku usaha perkebunan,disebabkan antara lain :
      - Masih banyaknya kepemilikan usaha perkebunan yang belum terdaftar dan/atau tanpa izin
      - Masih banyaknya pelaku usaha perkebunan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak
      - Masih minimnya informasi perpetaan kawasan perkebunan dari pelaku usaha perkebunan
   b. Belum optimalnya keberterimaan produk perkebunan di luar negeri. Hal ini disebabkan antara lain :
      - Masih kurangnya penerapan teknologi pengolahan yang baik dan benar (*Good Manufacturing Practices*/GMP)
      - Masih belum semuanya memiliki sertifikat berlanjutan/ kelestarian (*sustainability*)

## 1.8 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau selama Tahun 2022. Capaian kinerja *(performance result*s) Tahun 2022 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja *(performance agreement)* Tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja *(performance gap)* bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2022 berpedoman pada PP Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Aspek Strategis Organisasi, Permasalahan Utama Organisasi dan Sistematika Penulisan LKjIP.

**BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada bab ini disajikan gambaran atau ringkasan Perjanjian Kinerja yang ingin diraih OPD pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

3.1.2. Membandingkan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Beberapa Tahun Terakhir;

3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Akhir Renstra OPD;

3.1.4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Standar Nasional;

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan;

3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

3.1.7. Program/kegiatan yang menunjang ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

3.2 Realisasi Anggaran

3.2.1 Anggaran APBD

3.2.2 Anggaran APBN

**BAB IV PENUTUP**

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

**LAMPIRAN**

- Perjanjian Kinerja

# BAB II
# PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

## 2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU

Dalam menentukan strategi dan arah kebijakan Dinas Perkebunan Provinsi Riau mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 , dimana Dinas Perkebunan Provinsi Riau mendukung Misi 3 (Tiga) dan Misi 5 (Lima) Pemerintah Daerah Provinsi Riau, adalah sebagai berikut:

**VISI : Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)**

**MISI 3** :

**Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri Dan Berdaya Saing**

Tujuan : Mewujudkan Perekonomian yang mandiri dan berdaya saing

Sasaran : Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan

**MISI 5** :

**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Informasi**

Tujuan : Meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik

Sasaran : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel

### 2.1.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Dalam rangka mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dituangkan ke dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019 – 2024 yang merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau untuk periode 5 (lima) tahun dan sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perkebunan Provinsi Riau berperan dalam mendukung terlaksananya Misi ke 3 (Tiga) yaitu **Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing** dan Misi ke 5 (Lima) yaitu **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan**

**publik yang prima berbasis teknologi informasi.** Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau sebagai berikut :

- Tujuan

  Berdasarkan Visi dan Misi pembangunan Provinsi Riau serta tugas pokok dan fungsi maka tujuan Dinas Perkebunan Provinsi Riau adalah :

  1. Meningkatkan kinerja OPD Dinas Perkebunan Provinsi Riau;
  2. Meningkatkan pendapatan petani perkebunan

- Sasaran

  Dengan mengacu tujuan maka sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau adalah :

  1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel;
  2. Terwujudnya peningkatan produksi perkebunan berkelanjutan melalui :
     a. Peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian sub sektor perkebunan
     b. Peningkatan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian sub sektor perkebunan
     c. Peningkatan perizinan usaha pertanian sub sektor perkebunan
     d. Peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sub sektor perkebunan
     e. Peningkatan penyuluh pertanian sub sektor perkebunan

Untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani melalui peningkatan pendapatan petani perkebunan dengan menghitung pencapaian Nilai Tambah Usaha Perkebunan (NTUP), melalui peningkatan produksi tanaman utama perkebunan, untuk itu capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan Provinsi Riau berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Tahun 2019-2024 adalah meningkatnya produksi tanaman utama (kelapa sawit, kelapa, karet, sagu)

### 2.1.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Gubernur sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 Dinas Perkebunan Provinsi Riau mempuyai tujuan, sasaran dan strategi serta arah kebijakan pembangunan perkebunan seperti Tabel 5 berikut :

Tabel 5

**(Tabel.T-C. 26 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)**

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Visi :** | **Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat, dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)** | | |
| **Misi 3 :** | **Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Berdaya Saing** | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| Meningkatkan pendapatan petani perkebunan | Meningkatnya produksi perkebunan berkelanjutan | Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas utama perkebunan secara optimal dan berdaya saing, peningkatan penertiban perizinan pelaku usaha perkebunan, sarana dan prasarana, pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan serta peningkatan penyuluhan perkebunan untuk kesejahteraan pekebun | 1. Peningkatan produksi tanaman perkebunan secara berkelanjutan<br>2. Peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan secara berkelanjutan.<br>3. Terwujudnya fasilitasi pembinaan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan serta penanganan gangguan usaha dan konfik perkebunan.<br>4. Terwujudnya sistem perlindungan perkebunan dan penanganan dampak perubahan iklim yang terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan<br>5. Terwujudnya integrasi antar pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan pendekatan kawasan<br>6. Mendorong upaya pemberdayaan petani dan penumbuhan kelembagaan petani perkebunan yang lebih baik.<br>7. Mendorong upaya penerapan budidaya tanaman perkebunan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | dengan baik dan berwawasan lingkungan |
| | | | 8. Mendorong pengembangan pemasaran produk perkebunan di tataran domestik dan internasional yang berkualitas dan berdaya saing |
| | | | 9. Mendorong peningkatan kontribusi sub sektor perkebunan bagi pemerintah daerah |
| | | | 10. Mendorong peningkatan konservasi dan rehabilitasi, peningkatan produktifitas lahan perkebunan. |
| **Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Informasi** | | | |
| Meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik | Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel | Peningkatan kualitas pelayanan internal OPD | 1. Peningkatan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien |
| | | | 2. Peningkatan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan |
| | | | 3. Peningkatan pelayanan publik bidang Perkebunan secara akuntabel dan profesional |

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA

Dengan ditetapkannya Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mau tidak mau Dinas Peternakan harus menyesuaikan Program Kegiatan sesuai dengan nomenklatur yang ada pada Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 sehingga pada DPA tahun 2022 telah menggunakan nomenklatur tersebut.

Adapun Program Kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Riau pada DPA Tahun 2022 sesuai dengan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah sebagaiberikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
b. Program Peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian sub sektor perkebunan
c. Program Peningkatan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian sub sektor perkebunan
d. Program Peningkatan perizinan usaha pertanian sub sektor perkebunan
e. Program Peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sub sektor perkebunan
f. Program Peningkatan penyuluh pertanian sub sektor perkebunan

Dalam rangka mencapai tujuan Dinas Perkebunan yaitu peningkatan pendapatan petani perkebunan dengan sasaran peningkatan produksi tanaman utama perkebunan (kelapa sawit, kelapa, karet dan sagu) maka disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 6
Target Perjanjian Kinerja
Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2022

| ***NO*** | ***TUJUAN*** | ***SASARAN*** | ***INDIKATOR SASARAN*** | **TARGET MURNI** |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel | Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD | 68,29 (B) |
| 2. | Meningkatkan pendapatan petani perkebunan | Terwujudnya peningkatan produksi tanaman perkebunan | Jumlah produksi komoditas utama perkebunan, dengan rincian sbb : | 8.630.387 |
| | | | *- Kelapa sawit (ton CPO)* | 7.541.787 |
| | | | *- Kelapa (ton Kopra)* | 396.500 |
| | | | *- Karet (ton Karet Kering)* | 426.600 |
| | | | *-Sagu (ton Tepung Sagu)* | 265.500 |

Kemudian disusun Perjanjian Kinerja OPD Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2022. Adapun perjanjian kinerja Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat sebagai berikut :

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**
**PERANGKAT DAERAH**
**PROVINSI RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. ZULFADLI
Jabatan : KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SYAMSUAR
Jabatan : GUBERNUR RIAU
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, November 2022

Pihak Kedua,

SYAMSUAR

Pihak Pertama,

Ir. ZULFADLI
Pembina Utama madya
NIP. 19660803 199211 1 001

Dipindai dengan CamS

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**
**DINAS PERKEBUNAN**
**PROVINSI RIAU**
**BERDASARKAN PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2019-2024**

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel | Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD | 68,29 (B) |
| 2. | Terwujudnya peningkatan produksi tanaman perkebunan | Jumlah produksi komoditas utama perkebunan,dengan rincian sbb : | 8.430,387 |
| | | * *Kelapa sawit (ton CPO)* | 7.541,787 |
| | | * *Kelapa (ton kopra)* | 396,300 |
| | | * *Karet (ton karet kering)* | 426,600 |
| | | * *Saga (ton tepung saga)* | 265,500 |

| | PROGRAM | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Rp | 23,815,074,383 |
| 2. | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Rp | 1,992,922,835 |
| 3. | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Rp | 1,316,901,584 |
| 4. | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana | Rp | 105,999,751 |
| 5. | Program Perizinan Usaha Pertanian | Rp | 349,999,855 |
| 6. | Program Penyuluhan Pertanian | Rp | 197,543,418 |
| | **TOTAL APBD** | **Rp** | **27,778,441,826** |
| | **DEKONSENTRASI** | Rp | 889,951,000 |
| 1. | Program Dukungan Perlindungan Perkebunan | Rp | 204,700,000 |
| 2. | Program Dukungan Manajemen | Rp | 685,251,000 |
| | **TUGAS PEMBANTUAN** | Rp | **3,952,167,000** |
| 1. | Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri | Rp | 3,598,667,000 |
| 2. | Program Dukungan Manajemen | Rp | 353,500,000 |
| | **TOTAL APBN** | **Rp** | **4,842,118,000** |

Pekanbaru, November 2022

GUBERNUR RIAU

SYAMSUAR

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU

Ir. ZULFADLI
Pembina Utama Madya
NIP. 19660803 199211 1 001

Dipindai dengan CamScanner

Untuk mewujudkan pencapaian IKU Dinas Perkebunan, selain sumber dana APBD juga mendapatkan dana yang bersumber dari APBN yaitu dana Tugas Pembantuan dan dana Dekonsentrasi, selain itu juga mendapat sumber dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)

## 2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Riau maka tujuan utama program pembangunan tanaman perkebunan adalah meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan pendapatan petani tanaman perkebunan melalui peningkatan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) Perkebunan

Dinas Perkebunan Provinsi Riau telah melakukan pemetaan program dan kegiatan (mapping) terhadap nomenklatur program dan

kegiatan, sesuai RENSTRA Dinas Perkebunan Tahun 2019-2024 dengan program/kegiatan/sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Berdasarkan Peraturan tersebut maka mulai bulan Januari tahun 2021 Dinas Perkebunan Provinsi Riau melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 sesuai pemutahiran program/kegiatan/subkegiatan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019,

Adapun Perubahan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yang disesuaikan dengan pemetaan pemutahiran rencana program/kegiatan/subkegiatan dan pendanaan pembangunan perkebunan Provinsi Riau Tahun 2021 - 2024 adalah sebagai berikut:

*A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN*

1. *Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi*

   Terdiri dari 7 kegiatan dengan 15 sub kegiatan, yaitu :

   1. Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah

      Sub Kegiatan :

      a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

   2. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

      Sub Kegiatan :

      a. Penataan Barang Milik Daerah pada SKPD

   3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

      Sub Kegiatan :

      a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

   4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

      Sub Kegiatan :

      a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      c. Penyediaan bahan logistik kantor
      d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Sub Kegiatan :

   a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Sub Kegiatan :

   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Sub Kegiatan :

   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
   c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

*B. PROGRAM URUSAN PERTANIAN*

Terdiri dari 5 program, 8 kegiatan dan 11 sub kegiatan yaitu :

1. **Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertania**n

   1.1 Kegiatan : Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian

   Sub Kegiatan :

   a. Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian
   b. Koordinasi, sinkronisasi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya

   1.2 Kegiatan : Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih Tanaman

   Sub Kegiatan :

a. Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih (UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan)
b. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan (Bidang Disbun)
c. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan (UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan)

2. **Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

2.1 Kegiatan : Penataan Prasarana Pertanian

Sub Kegiatan :

a. Pengendalian dan pemanfaatan prasarana kawasan dan komoditas pertanian
b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
d. Koordinasi, sinkronisasi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya
e. Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan rutin gedung UPTD Pertanian serta sarana pendukungnya (UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan)

3. **Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian**

3.1 Kegiatan : Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi

Sub Kegiatan :

a. Pengendalian OPT tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan
b. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

4. **Program Perizinan Usaha Pertanian**

4.1 Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian

5. **Program Penyuluhan Pertanian**

5.1 Kegiatan : Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

Sub Kegiatan :

a. Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN
b. Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta

5.2 Kegiatan : Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian

Sub Kegiatan :

a. Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
b. Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani

5.3 Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Wawasan

Sub Kegiatan :

a. Pembentukan dan penguatan kelembagan koorporasi petani

## 2.4 INSTRUMEN PENDUKUNG

Informasi yang akurat dan mudah serta cepat untuk diakses sangat penting untuk pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Untuk memudahkan penyampaian informasi kepada masyarakat/publik dan transparansi pelaksanaan kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Riau memanfaatkan aplikasi pendukung. Dinas Perkebunan Provinsi Riau dalam penyampaian informasi kepada masyarakat telah menggunakan media informasi mengelola satu buah website, yaitu : *http://disbun.riau.go.id*, dan media sosial berupa *instagram dan twitter @disbunriau*

Pembuatan website ini adalah merupakan suatu upaya untuk menjembatani informasi yang semakin tidak terbatas serta untuk menuju penerapan E-Government pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau, yaitu sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang *E-Government*, yang mengatur mengenai penyelenggaraan layanan masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi. Secara umum

website tersebut memiliki fungsi untuk memberikan informasi dinas seperti profil dinas, berita perkebunan, Peta situs webside, data dan informasi, pengumuman serta layanan pengaduan dan diskusi (live chat)

Selain itu untuk mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan APBD menggunakan Sistem Informasi Pengendalian (http://monev.riau.go.id), yang merupakan sistem aplikasi yangdisusun oleh Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Riau, sedangkan untuk mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan APBN menggunakan Sistem Informasi Pengendalian SMART.Kemenkeu (http://smart.Kemenkeu.go.id) dan E-Monev Bappenas (http://e-monev.bappenas.go.id)

# BAB III
# AKUNTABILITAS KINERJA

## 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau dengan Gubernur Riau. Penilaian terhadap perjanjian kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan program dan kegiatan, mengevaluasi dan mengukur kinerja.

Gambaran keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran menjadi ukuran kinerja dapat dilakukan dengan pengumpulan data kinerja yang selanjutnya dilakukan evaluasi dengan melakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti pada Tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No. | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA |
|---|---|---|
| 1. | 91% ≤ 100% | Sangat tinggi |
| 2. | 76% ≤ 90% | Tinggi |
| 3. | 66% ≤ 75% | Sedang |
| 4. | 51% ≤ 65% | Rendah |
| 5. | ≤ 50% | Sangat Rendah |

Sumber : Berdasarkan Lampiran VII Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) Sedang : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah : pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Dari tabel 6 diatas penilaian kinerja Dinas Perkebunan

Pengukuran kinerja mencakup :

- Realisasi kinerja sasaran yang merupakan tingkat capaian dari masing-masing sasaran indikator kinerja
- Persentase pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian dari target masing-masing indikator kinerja.

Dengan penjelasan persentase pencapaian kinerja sebagai berikut untuk indikator jumlah produksi utama tanaman perkebunan (kelapa sawit, kelapa, karet dan sagu), semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik.

### 3.1.1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Dalam menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan berpedoman pada buku pelaksanaan Pengelolaan Data Komoditas Perkebunan (PDKP) sebagai panduan dalam pengumpulan dan pengelolaan data statistik Perkebunan yang telah disinkronkan dengan Direktorat Jenderal Perkebunan. Untuk menyamakan persepsi berikut adalah definisi dari istilah yang digunakan dalam penentuan indikator kinerja Dinas Perkebunan, adalah sebagai berikut :

a. Tanaman Perkebunan adalah jenis komoditas lingkup Kementerian Pertanian yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Ktps/PD.310/10/2009 tanggal 10 Oktober 2009.
b. Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) adalah tanaman yang belum memberikan hasil karena masih muda, belum pernah berbunga atau belum cukup umur untuk berproduksi.
c. Tanaman Menghasilkan (TM) adalah tanaman yang sedang menghasilkan dan atau sudah pernah menghasilkan walaupun saat ini sedang tidak menghasilkan karena belum musimnya.
d. Tanaman Rusak/Tanaman Tidak Menghasilkan (TR/ TTM) adalah tanaman yang sudah tua, rusak dan tidak memberikan hasil yang memadai lagi, walaupun ada hasilnya tetapi secara ekonomi sudah tidak produktif lagi (Produksi kurang dari 15 % dari produksi normal).
e. Produksi adalah banyaknya hasil dari setiap tanaman tahunan dan semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada semester/ triwulan laporan

f. Kelapa sawit *(Elaeis guineensis)* merupakan tanaman tropis penghasil minyak nabati yang hingga saat ini diakui paling produktif dan ekonomis dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati lainnya, misalnya kedelai, kacang tanah, kelapa, bunga matahari, dan lain-lain (Hadi, 2004). Produksi kelapa sawit dalam bentuk Crude Palm Oil (CPO). Formulasi Perhitungan dengan melakukan penjumlahan produksi kelapa sawit tahun berkenaan dibagi dengan luas areal Tanaman Menghasilkan (TM) tahun berkenaan dengan berpedoman PDKP

g. Kelapa *(Cocos nucifera L.)* merupakan salah satu komoditi unggulan perkebunan di Indonesia. Sebagai negara yang beriklim tropis, Indonesia merupakan habitat yang sangat cocok bagi pertumbuhan kelapa. Pohon kelapa dapat dijumpai hampir di seluruh wilayah Indonesia. Produksi kelapa dalam bentuk kopra (daging buah kelapa yang dikeringkan). Kopra merupakan salah satu produk turunan kelapa yang sangat penting, karena merupakan bahan baku pembuatan minyak kelapa dan turunannya. Formulasi Perhitungan dengan melakukan penjumlahan produksi kelapa tahun berkenaan dibagi dengan luas areal Tanaman Menghasilkan (TM) tahun berkenaan dengan berpedoman PDKP

h. Tanaman karet *(Hevea brasilliensis)* adalah tanaman getah-getahan. Produksi karet dalam bentuk shet/ karet kering, dimana Karet Kering menjadi salah satu ukuran kualitas lateks karena nilai ini menggambarkan besarnya kandungan air dalam lateks. Formulasi Perhitungan dengan melakukan penjumlahan produksi karet tahun berkenaan dibagi dengan luas areal Tanaman Menghasilkan (TM) tahun berkenaan dengan berpedoman PDKP

i. Pohon sagu atau rumbia dengan nama ilmiahnya *Metroxylon sagu*, termasuk dalam pohon dari famili palmae wilayah tropik basah, sagu umumnya ditemukan di rawa-rawa hutan dataran rendah dan air tawar tropis, Produksi sagu dalam bentuk tepung sagu dimana tepung atau olahan yang diperoleh dari pemrosesan teras batang rumbia. Formulasi Perhitungan dengan melakukan penjumlahan produksi sagu tahun berkenaan dibagi dengan luas areal Tanaman Menghasilkan (TM) tahun berkenaan dengan

berpedoman PDKP

Pada Tahun 2022 setelah dilakukan evaluasi dengan melakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja dapat dilihat pada tabel 8 sebagai berikut :

Tabel 8
Penilaian Realisasi Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau
Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Capaian Kinerja | % Capaian Kinerja | Penilaian realisasi kinerja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel | Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD | 68,29 (B) | 68,03 | 99,62% | Sangat Tinggi |
| 2 | Terwujudnya peningkatan produksi tanaman perkebunan | Jumlah produksi komoditas utama perkebunan, dengan rincian sbb : | 8.630.387 | 9.227.178 | 106,91% | |
| | | *- Kelapa sawit (ton CPO)* | 7.541.787 | 8.235.040 | 109,19% | Sangat Tinggi |
| | | *- Kelapa (ton Kopra)* | 396.500 | 393.732 | 99,30% | Sangat Tinggi |
| | | *- Karet (ton Karet Kering)* | 426.600 | 331.708 | 77,75% | Tinggi |
| | | *-Sagu (ton Tepung Sagu)* | 265.500 | 266.698 | 100,45% | Sangat Tinggi |

Berdasarkan Tabel 8 yaitu realisasi capaian kinerja tahun 2022 terhadap penilaian realisasi kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel

  Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, tujuan Dinas Perkebunan Provinsi Riau adalah meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik. Hasil dari evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan capaian realisasi kinerja Dinas Perkebunan dengan katagori kinerja *Sangat Tinggi*, ini berarti Dinas Perkebunan telah melaksanaan program dan kegiatan non urusan secara terukur dan jelas dengan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dengan telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai wujud tranparansi dan melaporkan hasil kinerjanya kepada Pemerintah Daerah Riau (Gubernur) yang dituangkan melalui Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP)

- Meningkatnya produksi komoditas utama perkebunan

  Dengan mengukur jumlah produksi utama tanaman perkebunan (data statistik tanaman perkebunan Angka Sementara / ASEM Tahun 2022)

  - ❖ Capaian Produksi kelapa sawit (ton) jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kerja 2022 dikategorikan *Sangat Tinggi* atau mencapai 109,19 %. Produksi kelapa sawit dalam bentuk Crude Palm Oil (CPO)
  - ❖ Capaian Produksi kelapa (ton) jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kerja 2022 dikategorikan *Sangat Tinggi* atau mencapai 99,30%. Produksi kelapa dalam bentuk kopra
  - ❖ Capaian Produksi karet (ton) jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kerja 2022 dikategorikan *Tinggi* atau mencapai 77,75%. Produksi karet dalam bentuk shet/ karet kering
  - ❖ Capaian Produksi sagu (ton) jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kerja 2022 dikategorikan Sangat *Tinggi* atau mencapai 100,45%. Produksi sagu dalam bentuk tepung sagu

### 3.1.2 Membandingkan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Beberapa Tahun Terakhir

Evaluasi kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2022 dengan membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2019 disajikan pada Tabel 9 berikut :

Tabel 9
Capaian Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja
Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2021- 2022

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Tahun 2021 | | | Tahun 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | Target* | Realisasi | Capaian Kinerja |
| 1 | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 67,59 (B) | 66,92 (B) | 99,0% | 68,29 (B) | 68,03 | 99,62% |
| 2 | Meningkatnya produksi komoditas utama perkebunan | Jumlah produksi komoditas utama perkebunan, dengan rincian sbb : | 8.536.241 | 8.756.156 | 102,57% | 8.630.387 | 9.227.178 | 106,91% |
| | | *- Kelapa sawit (ton CPO)* | 8.071.561,6 | 7.845.071 | 97,19% | 7.541.787 | 8.235.040 | 109,19% |
| | | *- Kelapa (ton Kopra)* | 391.457 | 392.433 | 100,2% | 396.500 | 393.732 | 99,30% |
| | | *- Karet (ton Karet Kering)* | 384.855 | 409.918 | 106,51% | 426.600 | 331.708 | 77,75% |
| | | *-Sagu (ton Tepung Sagu)* | 261.000 | 265.754 | 101,821% | 265.500 | 266.698 | 100,45% |

Sumber data : Statistik Perkebunan Angka Tetap (ATAP) Tahun 2021 dan Angka Sementara (ASEM) Tahun 2022

Dari tabel 8 diatas evaluasi kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2022 dengan membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 (Statistik Perkebunan Angka Sementara/ASEM) dengan tahun 2021 (Statistik Perkebunan Angka Tetap/ATAP) adalah sebagai sebagai berikut:

- Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel

  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perkebunan Provinsi Riau terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tanggal 16 September 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 62 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tujuan Dinas Perkebunan Provinsi Riau adalah meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik. Hasil dari evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan capaian realisasi kinerja Dinas Perkebunan tahun 2022 sebesar 100%, ini berarti Dinas Perkebunan telah melaksanaan program dan kegiatan non urusan secara terukur dan jelas dengan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dengan telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai wujud tranparansi dan melaporkan hasil kinerjanya kepada Pemerintah Daerah Riau (Gubernur) yang dituangkan melalui Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP). Untuk sasaran strategis ini Dinas Perkebunan Provinsi Riau pada Tahun 2022 mendapat nilai 68,03 dengan predikat B (Baik) dengan capaian sebesar 99,62% lebih tinggi dari pada Tahun 2021

- Peningkatan produksi komoditas utama perkebunan
  - ❖ Capaian realisasi produksi kelapa sawit tahun 2022 sebesar 8.235.040 ton CPO atau capaian kinerjanya 109,19% lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian realisasi produksi kelapa sawit tahun 2021 yaitu sebesar 7.845.071 ton CPO atau capaian kinerjanya 97,19%, hal ini disebabkan karena adanya pertambahan luas areal kelapa sawit rakyat sebesar 118.744 ha, sehingga jumlah produksi bertambah. Adapun perkembangan Capaian realisasi produksi kelapa sawit dapat dilihat pada grafik 1 di bawah ini :

Grafik 1
Perkembangan Produksi Kelapa Sawit
Tahun 2019 s/d 2022

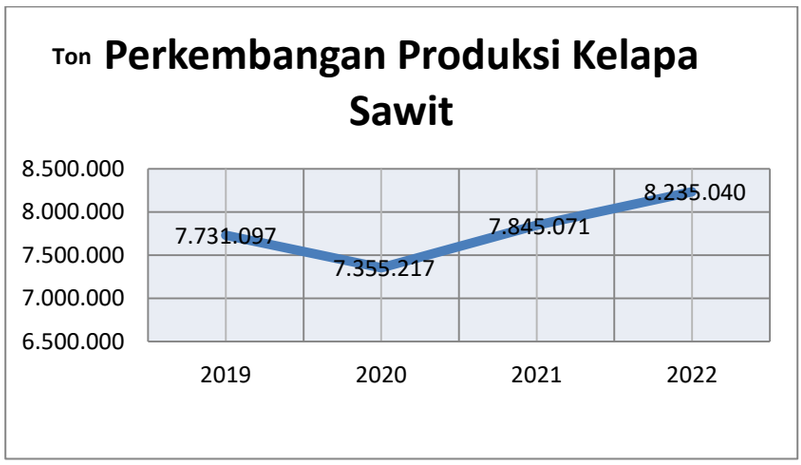


Dari grafik diatas menunjukkan bahwa perkembangan produksi kelapa sawit cenderung naik hal ini menunjukan banyaknya pertambahan luas areal kelapa sawit rakyat di Provinsi Riau, ini berarti perkebunan kelapa sawit sangat diminati masyarakat dan mampu mendobrak pertumbuhan perekonomian di Provinsi Riau serta menjadi andalan di sektor perkebunan

❖ Capaian realisasi produksi kelapa tahun 2022 sebesar 393.732 ton kopra atau capaian kinerjanya 99,30% lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian realisasi produksi kelapa tahun 2021 yaitu sebesar 394.983 ton kopra, namun demikian produksi masih relatif stabil, hampir sama dengan produksi tahun lalu, kenaikan produksi tidak signifikan bila dibandingkan tahun lalu Perkembangan Capaian realisasi produksi kelapa dapat dilihat pada grafik 2 di bawah ini :

Grafik 2
Perkembangan Produksi Kelapa
Tahun 2019 s/d 2022

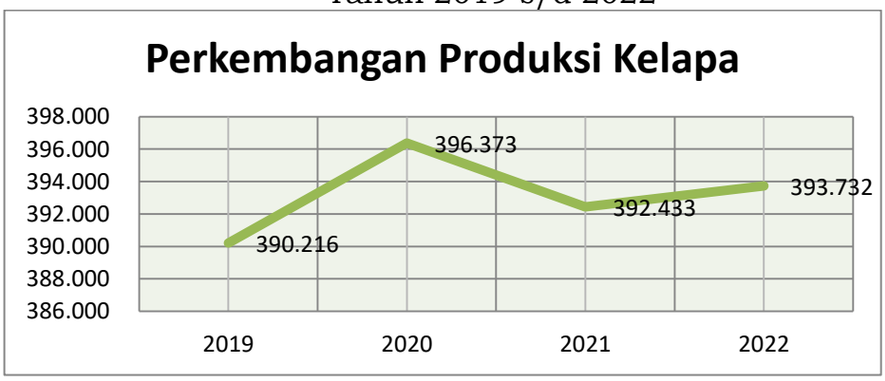


Dari grafik diatas menunjukkan bahwa perkembangan produksi kelapa cenderung stabil, namun pada tahun 2022 luas tanaman kelapa menurun dan bertambahnya luas tanaman tua rusak seluas 243 ha. Peningkatan produksi disebabkan adanya peningkatan produktivitas dari 1.214 kg/ha/th pada tahun 2021 menjadi 1.232 kg/ha/th pada tahun 2022

- Capaian realisasi produksi karet tahun 2022 sebesar 331.708 ton karet kering atau capaian kinerjanya 77,75% lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian realisasi produksi karet tahun 2021 yaitu sebesar 409.918 ton karet kering. Perkembangan Capaian realisasi produksi karet dapat dilihat pada grafik 3 di bawah ini :

Grafik 3
Perkembangan Produksi Karet
Tahun 2019 s/d 2022

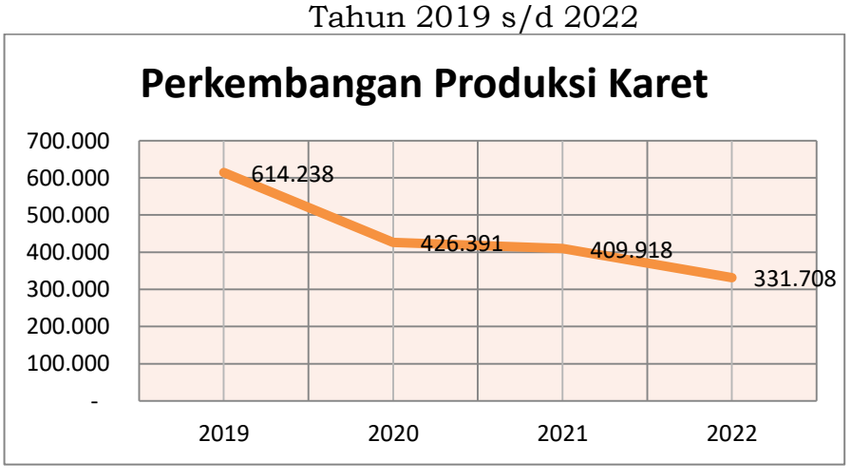


Dari grafik diatas menunjukkan bahwa perkembangan produksi karet cendrung mengalami penurunan produksi karena luas areal jauh berkurang karena banyaknya terjadi alih komoditi menjadi kelapa sawit dan juga alih fungsi lahan

❖ Capaian realisasi produksi sagu tahun 2022 sebesar 266.698 ton tepung sagu atau capaian kinerjanya 100,45% lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian realisasi produksi tahun 2021 yaitu sebesar 265.754 ton tepung sagu, Perkembangan Capaian realisasi produksi sagu dapat dilihat pada grafik 4 di bawah ini :

Grafik 4
Perkembangan Produksi Sagu
Tahun 2019 s/d 2022

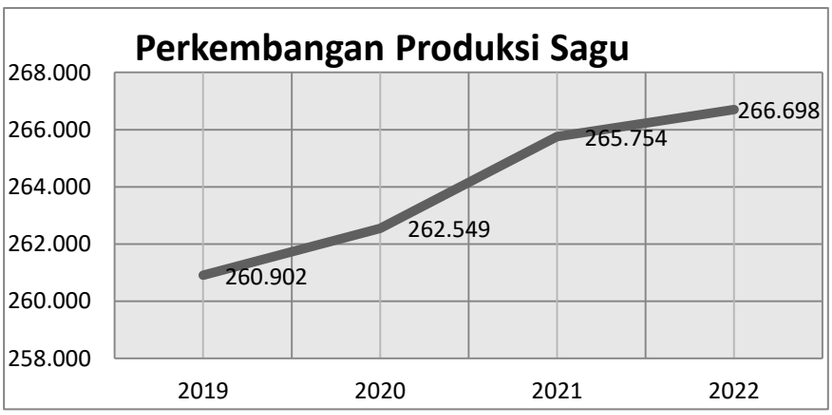


Dari grafik diatas menunjukkan bahwa perkembangan produksi sagu cenderung naik, hal ini disebabkan karena adanya penambahan luas areal perkebunan sagu rakyat yang diikuti dengan peningkatan produktivitas tanaman sagu

### 3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Akhir Renstra OPD

Untuk mengetahui capaian kinerja tahun 2022 bila dibandingkan dengan target yang akan dicapai pada Akhir Rencana Strategis (Renstra) tahun 2019-2024, perlu dilakukan komparasi pencapaian kinerja tahun 2022 dengan target akhir Renstra dan RPJMD, yang disajikan pada Tabel 10 berikut :

Tabel 10
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Dinas Perkebunan Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra 2022

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target akhir Renstra | Realisasi Tahun 2022 | Capaian tahun 2022 terhadap target akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 70,01 (BB) | 68,03 | 97,17% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Meningkatnya produksi komoditas utama perkebunan | Jumlah produksi komoditas utama perkebunan, dengan rincian sbb : | 8.822.314 | 9.227.178 | 104,5% |
| | | *- Kelapa sawit (ton CPO)* | 7.733.114 | 8.235.040 | 106,49% |
| | | *- Kelapa (ton Kopra)* | 396.700 | 393.732 | 99,25% |
| | | *- Karet (ton Karet Kering)* | 426.800 | 331.708 | 77,71% |
| | | *-Sagu (ton Tepung Sagu)* | 265.700 | 266.698 | 100,37% |

Sumber data : Statistik Perkebunan Angka Sementara (ASEM) Tahun 2022

Data pada Tabel 9 perbandingan capaian indikator kinerja Dinas Perkebunan Tahun 2022 dengan target akhir Renstra 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel

  Dinas Perkebunan telah melaksanaan program dan kegiatan non urusan secara terukur dan jelas dengan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dengan telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai wujud tranparansi dan melaporkan hasil kinerjanya kepada Pemerintah Daerah Riau (Gubernur) yang dituangkan melalui Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP)

- Meningkatnya produksi komoditas utama perkebunan

  Pada indikator jumlah produksi komoditas utama perkebunan tahun 2022 berdasarkan data statistik perkebunan Angka Sementara (ASEM), capaian kinerja produksi kelapa sawit dan produksi sagu melebihi target akhir Renstra, dan untuk capaian produksi kelapa dan karet tidak mencapai target. Hal ini berarti perlu upaya yang nyata untuk mencapai target yang telah ditetapkan, guna peningkatan produksi tanaman perkebunan dengan melakukan peremajaan, intensifikasi dan diversifikasi tanaman perkebunan.

### 3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Standar Nasional

Untuk mengetahui capaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2022 (Data : Statistik Perkebunan Dalam Angka Sementara/ASEM Tahun 2022) bila dibandingkan dengan capaian realisasi tingkat nasional (Data : Statistik Perkebunan Dalam Angka

Sementara/ASEM Pusdatin Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2022), dapat disajikan pada Tabel 11 berikut :

Tabel 11
Realisasi Capaian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau
dibandingkan dengan Capaian Tingkat Nasional Tahun 2022

| No | Uraian | Provinsi Riau | Nasional | % Capaian |
|---|---|---|---|---|
| | Jumlah produksi komoditas utama perkebunan, dengan rincian sbb : | 9.227.178 | 51.956.326 | 17,75% |
| 1 | - *Kelapa sawit (ton CPO)* | 8.235.040 | 45.580.892 | 18,06% |
| 2 | - *Kelapa (ton Kopra)* | 393.732 | 2.871.167 | 13,71% |
| 3 | - *Karet (ton Karet Kering)* | 331.708 | 3.135.287 | 10,57% |
| 4 | -*Sagu (ton Tepung Sagu)* | 266.698 | 368.980 | 72,27% |

Sumber data : Statistik Perkebunan Dalam Angka Sementara/ASEM Tahun 2022 (Provinsi)
Statistik Perkebunan Dalam Angka Sementara/ASEM Tahun 2022 Pusdatin Dirjenbun (Nasional)

Data pada Tabel 11 perbandingan capaian indikator kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2022 dengan capaian tingkat nasional (Pusdatin Dirjenbun) Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Komoditi Kelapa Sawit

  Bila dibandingkan dengan capaian tingkat nasional, capaian produksi komoditi kelapa sawit di Provinsi Riau Tahun 2022 sebesar 18,06% lebih tinggi dari pada tahun 2021 sebesar 14,33%, dimana Provinsi Riau menempati tingkat pertama produksi kelapa sawit terbanyak di Indonesia, yang diikuti provinsi Kalimantan Tengah peringkat kedua dan Sumatera Utara peringkat ketiga. Sedangkan untuk produktivitas kelapa sawit di Provinsi Riau masih rendah bila dibandingkan dengan tingkat nasional, sehingga perlu adanya upaya untuk peningkatan produktivitas kelapa sawit melalui peningkatan usaha budidaya kelapa sawit sesuai dengan standar teknisnya

- Komoditi Kelapa

  Bila dibandingkan dengan capaian tingkat nasional, capaian produksi komoditi kelapa di Provinsi Riau sebesar 13,71%, Dimana Provinsi Riau menempati tingkat pertama produksi kelapa terbanyak di Indonesia yang diikuti provinsi Sulawesi Utara dan Jawa Timur. Sedangkan untuk produktivitas kelapa di Provinsi Riau lebih tinggi bila dibandingkan

dengan tingkat nasional, walaupun demikian masih banyak persoalan kelapa di Riau dari hulu hingga hilir, mulai dari intrusi air laut yang sangat besar karena tanggul penahan jebol, drainase wadah transpotasi pengangkut kelapa banyak yang rusak, selain itu tanaman kelapa sudah banyak yang tua sehingga perlu melakukan replanting kebun kelapa yang tua dan rusak, dan juga diperlukan pengembangan pengolahan kelapa yang bisa menghasilkan produk turunan antara lain minyak kelapa, sabut kelapa, briket arang, arang aktif, serta menyediakan akses pasar dan perlunya ketetapan harga pembelian kelapa petani.

- Komoditi Karet

  Bila dibandingkan dengan capaian tingkat nasional, capaian produksi komoditi karet di Provinsi Riau sebesar 10,57%, dimana Provinsi Riau menempati tingkat ke tiga produksi karet terbanyak di Indonesia, dimana produksi karet terbanyak di provinsi Sumatera Selatan peringkat pertama dan Sumatera Utara peringkat kedua. Sedangkan untuk produktivitas karet di Provinsi Riau lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat nasional. Walaupun demikian produksi karet di Provinsi Riau perlu ditingkatkan melalui program penanaman kembali (replanting) atau revitalisasi pohon karet karena pohon karet yang ada saat ini sudah terbilang cukup tua dan tidak produktif.

- Komoditi Sagu

  Bila dibandingkan dengan capaian tingkat nasional, capaian produksi komoditi sagu di Provinsi Riau sebesar 72,27%, dimana Provinsi Riau menempati tingkat pertama produksi sagu terbanyak di Indonesia, yang diikuti provinsi Papua dan Maluku. Sedangkan untuk produktivitas sagu di Provinsi Riau lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat nasional. Kendala petani dalam usaha sagu antara lain waktu panen yang cukup lama, teknik budidaya sagu yang belum intensif, dan pengelolaan kebun belum maksimal serta industri hilir sagu di Riau belum ada. Semua kendala tersebut menghambat petani untuk mau melakukan budidaya tanaman sagu, karena saat menunggu panen yang terlalu lama tidak diikuti dengan pendapatan petani yang memadai

### 3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan

3.1.5.1 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel

a. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian keberhasilan kinerja OPD dengan melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan secara terukur dan jelas dengan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dengan telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Reformasi Birokrasi (SAKIP & RB) yang merupakan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai wujud tranparansi dan melaporkan hasil kinerjanya kepada Pemerintah Daerah Riau (Gubernur) yang dituangkan melalui Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP).

b. Permasalahan teknis yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Perkebunan sehingga diperlukan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pelatihan untuk pencapaian keberhasilan kinerja OPD

c. Solusi yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau dalam mengatasi masalah tersebut dengan mengusulkan pembinaan, pendampingan dan pelatihan SDM serta penambahan SDM yang cakap sesuai dengan peta jabatan dan kompetensi (pendidikan, keahlian) untuk menuju brending ASN/core values ASN BerAKHLAK.

3.1.5.2 Meningkatnya produksi komoditas utama perkebunan

a. Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan produksi komoditas utama perkebunan untuk pencapaian keberhasilan kinerja OPD dengan strategi pengembangan komoditas unggulan perkebunan baik intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi perkebunan dan difokuskan pada peningkatan kualitas komoditas unggulan baik pada penerapan teknologi

produksi, teknologi pascapanen, efisiensi biaya produksi, standarisasi mutu, pengolahan sampai dengan pemasaran.

b. Permasalahan teknis yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja Dinas Perkebunan Provnsi Riau antara lain :
   - Masih kurangnya penerapan teknologi budidaya tanaman yang baik dan benar (Good Agriculture Parctices/GAP)
   - Infrastruktur yang belum memadai
   - Kapasitas SDM petani masih rendah
   - Industri hilir dan pemasaran masih terbatas
   - Masih banyaknya kepemilikan usaha perkebunan yang belum terdaftar dan/atau tanpa izin
   - Menurunya potensi lahan produktif
   - Belum optimalnya pemanfaatan lahan dan pengaturan pola tanam (diversifikasi)
   - Kapasitas dan profesionalisme SDM Aparatur belum memadai
   - Pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun serta gangguan usaha yang belum menjangkau seluruh wilayah

c. Solusi yang dilakukan Dinas Perkebunan Provinsi Riau dalam mengatasi masalah adalah :
   - Penyediaan sarana prasarana perkebunan untuk perkebunan rakyat melalui penyediaan bibit kelapa sawit bersertifikasi
   - Peningkatan infrastruktur dan sarana perkebunan
   - Adanya program dan kebijakan yang tegas tentang upaya pembangunan perkebunan berkelanjutan melalui program Peremajaan Kelapa Sawit (PSR)
   - Peningkatan pemberdayaan penyuluh perkebunan melalui koordinasi dengan penyuluh di kabupaten/kota
   - Peningkatan industri hilir dan pemasaran perkebunan melalui pembinaan dan penetapan harga TBS kelapa sawit Provinsi Riau

- Peningkatan penertiban Izin pelaku usaha perkebunan melalui pembinaan kepada pelaku usaha perkebunan
- Pembinaan, pendampingan dan pelatihan kelompok tani dalam optimalisasi komoditas unggulan daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat pekebun secara berjenjang dan berkelanjutan

### 3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mengetahui penggunaan sumber daya pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2022 dalam pencapaian IKU Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel 12 sebagai berikut :

Tabel 12
Capaian Realisasi Program dan Kegiatan dan Anggaran
Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2022

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN FORMULASI PENGHITUNGAN | TARGET IKU Tahun 2022 | REALISASI IKU Tahun 2022 | CAPAIAN IKU Tahun 2022 | PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022 | PAGU ANGGARAN (Rp) | REALISASI ANGGARAN (Rp) | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| I | **Terwujudnya peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan** | Jumlah produksi : | Jumlah produksi komoditas utama tanaman perkebunan (data statistik Angka Sementara) | | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **1.992.922.835** | **1.821.481.123** | |
| | | 1. Kelapa sawit | | 7.541.787,00 | 8.235.040,00 | 109,19 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | 1.314.528.750 | 1.216.602.988 | |
| | | 2. kelapa | | 396.500,00 | 393.732,00 | 99,30 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman (UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan) | 585.522.225 | 545.401.375 | |
| | | 3. karet | | 426.600,00 | 331.708,00 | 77,76 | Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih ( UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan) | 92.871.860 | 59.476.760 | |
| | | 4. Sagu | | 265.500,00 | 266.698,00 | 100,45 | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | 1.316.901.584 | 1.147.788.565 | |
| | | | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani | 419.004.910 | 405.127.675 | |
| | | | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | 897.896.674 | 742.660.890 | |
| | | | | | | | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | 105.999.751 | 97.264.065 | |
| | | | | | | | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi | 105.999.751 | 97.264.065 | |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN FORMULASI PENGHITUNGAN | TARGET IKU Tahun 2022 | REALISASI IKU Tahun 2022 | CAPAIAN IKU Tahun 2022 | PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022 | PAGU ANGGARAN (Rp) | REALISASI ANGGARAN (Rp) | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| | | | | | | | **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | 349.999.855 | 280.687.974 | |
| | | | | | | | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam daerah Kabupaten/Kota | 349.999.855 | 280.687.974 | |
| | | | | | | | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | 197.543.418 | 140.859.100 | |
| | | | | | | | Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian | 49.719.750 | 39.161.000 | |
| | | | | | | | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian | 55.131.028 | 46.204.300 | |
| | | | | | | | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan | 92.692.640 | 55.493.800 | |
| **JUMLAH** | | | | | | | | **3.963.367.443** | **3.488.080.827** | |

Dari sajian Tabel 12 diatas, pelaksanaan Dinas Perkebunan sebagai berikut:

- Total Pagu anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2022 semula sebesar Rp.25.515.251.687,- setelah perubahan pada APBD-P menjadi sebesar Rp.27.778.441.826 dengan rincian anggaran untuk non urusan sebesar Rp. 23.815.074.383,- dan anggaran untuk pencapaian IKU sebesar Rp.3.963.367.443,-
- Realisasi pelaksanaan Urusan untuk pencapaian IKU dana APBD untuk program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Perkebunan dengan pagu sebesar Rp.3.963.367.443,- terealisasi Rp.3.488.080.827,- atau 88%.
- Analisis Efisiensi penggunaan sumberdaya Dinas Perkebunan dalam pencapaian IKU berdasarkan target Renja Tahun 2022 sebagai berikut :
  - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan predikat kinerja *Sangat Tinggi* hal ini berarti kegiatan/ sub kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan, dengan capaian keuangan sebesar 91,40% dan fisik sebesar 96,10%
  - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan predikat kinerja *Tinggi* hal ini berarti kegiatan/ sub kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan, dengan capaian keuangan sebesar 87,16% dan fisik sebesar 100%
  - Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan predikat kinerja *Sangat Tinggi* hal ini berarti kegiatan/ sub kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan, dengan capaian keuangan sebesar 91,76% dan fisik sebesar 100%
  - Program Perizinan Usaha Pertanian dengan predikat kinerja *Tinggi* hal ini berarti kegiatan/ sub kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan, dengan capaian keuangan sebesar 80,20% dan fisik sebesar 100%
  - Program Penyuluhan Pertanian dengan predikat kinerja S*edang* hal ini berarti kegiatan/ sub kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan, dengan capaian keuangan sebesar 74,15% dan fisik sebesar 100%

Sedangkan target dan capaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2022 berdasarkan program dapat dilhat pada tabel berikut :

Tabel 13
Capaian Indikator Program Dinas Perkebunan Provinsi Riau
Tahun 2022

| NO | KODE PROGRAM | NAMA PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | TARGET KINERJA PERUBAHAN 2022 | | CAPAIAN KINERJA PERUBAHAN 2022 | JUSTIFIKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KINERJA | ANGGARAN | KINERJA | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| | | | | | | | |
| | | DINAS PERKEBUNAN | | | | | |
| I | 3:27:01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran bidang perkebunan | 100 persen | 23,815,074,383 | 100 persen | |
| II | 3:27:02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Jumlah produksi komoditas utama perkebunan | 8630387 ton | 1,992,922,835 | 9.227.178 Ton | Statistik perkebunan Angka Sementara |
| III | 3:27:03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Jumlah produktivitas komoditas utama perkebunan | 12,609 kg/ha/th | 1,316,901,584 | 11,932 kg/ha/th | Statistik perkebunan Angka Sementara |
| IV | 3:27:05 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Luas lahan yang dikendalikan | 0,1 persen | 105,999,751 | 0,15 persen | Luas serangan 67.275 ha dibagi luas pengendalian 100 ha di kali seratus |
| V | 3:27:06 | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | Persentase usaha perkebunan yang memiliki izin | 66,95 persen | 349,999,855 | 64.53% | Hasil Pemetaan Perkebunan Tahun 2022 |
| VI | 3:27:07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya | 1,78 persen | 197,543,418 | 1,81 persen | Peningkatan SDM Disbun (APBD,APBN, BPDPKS) |
| JUMLAH | | | | | 27,778,441,826 | | |

### 3.1.7 Analisis Program/kegiatan yang menunjang ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk pencapaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau pada Tahun 2022 dianggarkan melalui sumber dana APBD dan APBN baik dana alokasi Tugas Pembantuan (TP) maupun Dekonsentrasi. Adapun faktor-faktor program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian indikator sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau antara lain, sebagai berikut :

- Tersedianya Sumberdaya manusia (ASN Dinas Perkebunan) yang telah melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsi guna memberikan pelayanan kepada masyarakat (Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel)
- Potensi sumberdaya tanaman perkebunan masih dapat ditingkatkan;
- Iklim investasi terhadap produk perkebunan kondusif;
- Meningkatnya kebutuhan bahan pangan;
- Adanya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari dana BPDPKS
- Sudah adanya program dan kebijakan yang tegas tentang upaya pengentasan kemiskinan.
- Sudah adanya program dan kebijakan yang tegas tentang upaya pembangunan perkebunan berkelanjutan.

Sedangkan faktor-faktor penyebab kegagalan capaian program/kegiatan dalam pencapaian indikator sasaran antara lain sebagai berikut :

- Masih banyaknya komoditas tanaman utama perkebunan tua rusak (TTR) sehingga menurunnya produktivitas, menyebabkan jumlah produksi berkurang
- Adanya intrusi air laut ke lahan perkebunan kelapa petani sehingga banyak tanaman kelapa mati
- Adanya peremajaan kebun kelapa sawit di Provinsi Riau melalui program Peremajaan Kelapa Sawit (PRS) sehingga berkurangnya jumlah produksi (tanaman belum menghasilkan)
- Kurangnya pelatihan bagi aparat/ASN penyelenggara pembangunan perkebunan
- Sarana dan prasarana perkebunan belum memadai
- Penerapan teknologi terbatas untuk memperoleh informasi

## 3.2 REALISASI ANGGARAN

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Riau yaitu meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan pendapatan petani perkebunan yang diukur dengan indikator Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) sektor Perkebunan.

Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) yaitu rasio indeks harga yang diterima petani dari usaha perkebunan dengan indeks harga yang dibayarkan petani untuk pengeluaran usaha perkebunan. Artinya NTUP di atas 100 menunjukkan petani surplus, sama dengan 100 berarti impas dan di bawah 100 berarti petani rugi/defisi.

NTUP Perkebunan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau pada Tahun 2022 rata-rata mencapai sebesar 149,56 , ini menunjukkan bahwa usaha petani sub sektor perkebunan surplus yang berarti petani yang melakukan usaha perkebunan dapat meningkat pendapatannya sehingga dapat menambah kesejateraan keluarganya. Kenaikan NTUP sub sektor perkebunan ditopang oleh berbagai fasilitas pendukung antara lain adanya kenaiknya harga jual TBS/ojol/kelapa/sagu dan hasil komoditi perkebunan lainnya.

Selain itu sub sektor perkebunan di Provinsi Riau berdasarkan data BPS Provinsi Riau merupakan penyumbang kontribusi terbesar

terhadap pencapaian PDRB ADHB menurut lapangan usaha pertanian sektor Perkebunan Riau pada tahun 2022 sebesar 156 Miliar (69,72%)

Dalam pelaksanaan urusan perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Riau dilaksanakan melalui sumber dana APDB dan APBN. Untuk mengetahui pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 3.2.1 Anggaran APBD

Pada Tahun 2022 pagu awal/murni Dinas Perkebunan Provinsi Riau sebesar Rp.25.444.210.521,- dan mengalami perubahan pada APBD-Perubahan menjadi Rp.27.778.441.826,-. Pelaksanaan program perkebunan dilaksanakan melalui 6 Program dan 12 Kegiatan dan 25 sub kegiatan, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.26.076.351.459,- (93,87%) dan realisasi fisik sebesar 99,67 %. Adapun capaian realisasi program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 14 berikut :

Tabel 14
Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun 2022

| NO | NAMA PROGRAM/KEGIATAN | PAGU AWAL (Rp) | PAGU PERUBAHAN (Rp) | PROGRES KEUANGAN | | PROGRES FISIK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | REALISASI SPJ | | TARGET | REALISASI |
| | | | | (Rp) | (%) | (%) | (%) |
| | | | | | | | |
| | **DINAS PERKEBUNAN** | | | | | | |
| **I** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **21.455.525.318** | **23.815.074.383** | **22.588.270.632** | **94,85** | **100** | **100** |
| **1** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **16.325.357.035** | **18.389.590.018** | **17.798.605.650** | **96,79** | **100,00** | **100,00** |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 16.325.357.035 | 18.389.590.018 | 17.798.605.650 | 96,79 | 100,00 | 100,00 |
| **2** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **64.365.000** | **64.365.000** | **44.921.750** | **69,79** | **100,00** | **100,00** |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 64.365.000 | 64.365.000 | 44.921.750 | 69,79 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **107.800.000** | **107.800.000** | **107800000** | **100** | **100,00** | **100,00** |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 107.800.000 | 107.800.000 | 107800000 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| **4** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **1.263.088.561** | **1.363.406.081** | **1.090.598.265** | **79,99** | **100,00** | **100,00** |
| a. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 185.327.442 | 185.327.442 | 184.739.581 | 99,68 | 100,00 | 100,00 |
| b. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 342.805.200 | 357.805.200 | 315.281.795 | 88,12 | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 99.999.965 | 128.999.965 | 91.911.000 | 71,25 | 100,00 | 100,00 |
| d. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 87.545.244 | 93.862.764 | 93.844.297 | 99,98 | 100,00 | 100,00 |
| e. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 547.410.710 | 597.410.710 | 404.821.592 | 67,76 | 100,00 | 100,00 |
| **5** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **607.777.068** | **652.776.723** | **610.530.587** | **93,53** | **100,00** | **100,00** |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 607.777.068 | 652.776.723 | 610.530.587 | 93,53 | 100,00 | 100,00 |
| **6** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **2.418.902.654** | **2.568.901.822** | **2.298.960.877** | **89,49** | **100,00** | **100,00** |
| a. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12.500.000 | 12.500.000 | 10.000.000 | 80,00 | 100,00 | 100,00 |
| b. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 435.619.956 | 485.619.124 | 363.740.243 | 74,90 | 100,00 | 100,00 |
| c. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.970.782.698 | 2.070.782.698 | 1.925.220.634 | 92,97 | 100,00 | 100,00 |
| **7** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **668.235.000** | **668.234.739** | **636.853.503** | **95,30** | **100,00** | **100,00** |
| a. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 317.610.000 | 317.610.000 | 317.482.959 | 99,96 | 100,00 | 100,00 |
| b. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 50.000.000 | 50.000.000 | 23.246.100 | 46,49 | 100,00 | 100,00 |
| c. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 300.625.000 | 300.624.739 | 296.124.443,84 | 98,50 | 100,00 | 100,00 |
| **II** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **2.100.857.595** | **1.992.922.835** | **1.821.481.123** | **91,40** | **100,00** | **96,10** |
| 1 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman/Bibit Perkebunan (Bidang Produksi) | 1.407.985.750 | 1.314.528.750 | 1.216.602.988 | 92,55 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan (**UPT PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN** ) | 599.999.985 | 585.522.225 | 545.401.375 | 93,15 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih (**UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN)** | 92.871.860 | 92.871.860 | 59.476.760 | 64,04 | 100,00 | 88,31 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **III** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | **1.234.284.584** | **1.316.901.584** | **1.147.788.565** | **87,16** | **100,00** | **100,00** |
| 1 | Penataan Prasarana Pertanian | 1.234.284.584 | 1.316.901.584 | 1.147.788.565 | 87,16 | 100,00 | 100,00 |
| a. | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani | 599.844.910 | 419.004.910 | 405.127.675 | 96,69 | 100,00 | 100,00 |
| b. | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | 634.439.674 | 897.896.674 | 742.660.890 | 82,71 | 100,00 | 100,00 |
| **IV** | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | **105.999.751** | **105.999.751** | **97.264.065** | **91,76** | **100,00** | **100,00** |
| 1 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi | 105.999.751 | 105.999.751 | 97.264.065 | 91,76 | 100,00 | 100,00 |
| | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 105.999.751 | 105.999.751 | 96.620.245 | 91,15 | 100,00 | 100,00 |
| **V** | **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | **349.999.855** | **349.999.855** | **280.687.974** | **80,20** | **100,00** | **100,00** |
| 1 | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam daerah Kabupaten/Kota | 349.999.855 | 349.999.855 | 280.687.974 | 80,20 | 100,00 | 100,00 |
| | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian | 349.999.855 | 349.999.855 | 280.687.974 | 80,20 | 100,00 | 100,00 |
| **VI** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | **197.543.418** | **197.543.418** | **140.859.100** | **74,15** | **100,00** | **93,33** |
| 1 | Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian | 49.719.750 | 49.719.750 | 39.161.000 | 78,76 | 100,00 | 100,00 |
| | Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta | 49.719.750 | 49.719.750 | 39.161.000 | 78,76 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian | 55.131.028 | 55.131.028 | 46.204.300 | 83,81 | 100,00 | 100,00 |
| | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani | 55.131.028 | 55.131.028 | 46.204.300 | 83,81 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan | 92.692.640 | 92.692.640 | 55.493.800 | 59,87 | 100,00 | 80,00 |
| | Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani | 92.692.640 | 92.692.640 | 55.493.800 | 59,87 | 100,00 | 80,00 |
| **JUMLAH** | | **25.444.210.521** | **27.778.441.826** | **26.076.351.459** | **93,87** | **100** | **99,67** |

Dari tabel 14 dapat dirincikan sebagai berikut :

**PROGRAM PENDUKUNG (NON URUSAN)**

- **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi** terdiri dari 7 kegiatan dan 15 sub kegiatan, dengan anggaran (APBD-P) sebesar Rp. 23.815.074.018,- , dengan realisasi keuangan sebesar Rp.22.588.270.632,- (94,85%) dan realisasi fisik sebesar 100 %.

- **Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**

  Terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, dengan anggaran (APBD-P) sebesar Rp. 1.992.922.835,- , dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.821.481.123,- (91,40%) dan realisasi fisik sebesar 100 %.

  Adapun rincian sub kegiatan sebagai berikut :

  1. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman/Bibit Perkebunan (Bidang Produksi)

     Pelaksanaan sub kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman/Bibit Perkebunan (Bidang Produksi) anggaran (APBD-P) sebesar Rp. 1.314.528.750,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.216.602.988,- (92,55%) dan realisasi fisik sebesar 100 %. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

     a. Peremajaan Kebun Kelapa Rakyat, seluas 150 ha dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hilir pada KT. Mina Padi (50 Ha) Desa Sialang Panjang Kecamatan Tembilahan Hulu, KT. Indah Jadi (50 ha) Kelurahan Seberang Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan dan KT. Indah Jaya (50 Ha) Kelurahan Seberang Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan, dengan pemberian bantuan hibah berupa bibit kelapa, pupuk organik, hansprayer dan herbisida, dengan pagu anggaran sebesar Rp578.287.545,- dan realisasi keuangan Rp.559.807.795,- (96,80%) serta realisasi fisik sebesar 100%

b. Intensifikasi Tanaman Perkebunan, tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan produktivitas kebun karet rakyat melalui pemberian sarana produksi berupa hand sprayer, herbisida dan pupuk organik. Intensifikasi tanaman karet Tahun 2022 seluas 103,5 ha dilaksanakan di Kabupaten Kuantan Singingi pada KT. Berkah Basamo (60 Ha) Desa Lubuk Terentang Kecamatan Gunung Toar dan KT.Beja Cemerlang (43,5 Ha) Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah, dengan pagu anggaran sebesar Rp.243.600.500,- dan realisasi keuangan Rp.215.043.478,- (88,28%) serta realisasi fisik sebesar 100%

c. Diversifikasi Tanaman Perkebunan, komoditi kopi seluas 34 ha dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Meranti pada KT. Semangat Pesisir Kec. Rangsang Pesisir, Desa Tanah Merah, dengan pemberian bantuan hibah berupa pupuk organik dan bibit kopi dan komoditi pinang seluas 99 ha dilaksanakan di Kabupaten Pelalawan pada KT. Kita Bersama II (59 Ha) Desa Langkan, Kecamatan Langgam, dan di Kabupaten Kepulauan Meranti pada KT. Pramuka 25 Ha (pinang) Kec. Rangsang Pesisir, Desa Kayu Ara dan KT. Usaha Bersama 15 Ha (pinang) Kec. Tebing Tinggi Barat, Desa Tanjung dengan pemberian bantuan hibah berupa pupuk organik dan bibit pinang. Pagu anggaran Diversifikasi Tanaman Perkebunan sebesar Rp. Rp.492.640.705,- dan realisasi keuangan Rp441.751.715,- (89,67%) serta realisasi fisik sebesar 100%

2. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan (**UPT PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN**)

   Pelaksanaan kegiatan pembibitan kelapa sawit sebanyak 15.000 bibit dengan pagu anggaran sebesar Rp.585.522.225, dan realisasi keuangan Rp.545.401.375,- (93,15%) serta realisasi fisik sebesar 100%, serta menyumbang PAD sebesar Rp.302.500.000,- atau mencapai 60,50% dari target PAD Rp.500.000.000,-

3. Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih (**UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN)**

   Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan sertifikasi benih perkebunan pada Tahun 2022 sebanyak 35.321.141 bibit dan kecambah, dengan pagu anggaran sebesar Rp.92.871.860, dan realisasi keuangan Rp.59.476.760,- (64,04%) serta realisasi fisik sebesar 100%, serta menyumbang PAD sebesar Rp.739.195.107,- atau mencapai 49,48% dari target PAD Rp.1.494.000.000,-

❖ **Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

Terdiri dari 1 kegiatan yaitu Penataan Prasarana Pertanian dan 2 sub kegiatan, dengan anggaran (APBD-P) sebesar Rp. 1.316.901.584,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.147.788.565,- (87,16%) dan realisasi fisik sebesar 100 %. Adapun rincian sub kegiatan sebagai berikut :

a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani

   Pelaksanaan kegiatan berupa normalisasi saluran drainase pada areal perkebunan rakyat sepanjang 3,3 Km, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 599.844.910,-, namun mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 419.004.910,-. Adapun realisasi anggaran yang telah digunakan dalam kegiatan ini adalah sebesar Rp. 405.127.675,- atau sebesar 96,69 % Dan realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan normalisasi saluran drainase dilaksanakan di 2 (dua) Kabupaten/Kota yaitu :

   1. Normalisasi Saluran Drainase di Poktan Subur Makmur Desa Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan sepanjang 1.565,725 meter.

2. Normalisasi Saluran Drainase di Poktan Karya Akang Desa Teluk Pinang Kec. Gaung Anak Serka Kab. Indragiri Hilir sepanjang 1.670 meter.

b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya

Pelaksanaan kegiatan bantuan berupa hibah barang yang diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat dengan anggaran (APBD-P) sebesar Rp. 897.896.674,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 742.660.890,- (82,71%) dan realisasi fisik sebesar 100%, terdiri dari:

1. Sasaran Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian kebun karet dengan bantuan alat pasca panen tanaman karet dalam bentuk paket bantuan alat pasca panen (Mangkok Sadap, Cincin Mangkok Sadap, Talang Sadap, Pisau Sadap, Pembeku Lateks,Gerobak Sorong) pada 2 kelompok tani di Kabupaten Bengkalis yaitu KT. Perkasa Tani Alam Desa Penebal Kecamatan Bengkalis dan KT. Timur Barat Desa Penebal Kecamatan Bengkalis
2. Selain itu kegiatan Penataan Prasarana Pertanian memberikan bantuan kendaraan roda tiga sebanyak 12 nit yang berada di :
   a. Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 3 kelompok tani masing-masing kelompok tani 1 unit, yaitu :
      1) KT. Elok Basamo Desa Parit Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya
      2) KT. Harapan Bersama Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir
      3) KT. Tanah Sigha Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah
   b. Kabupaten Kampar 2 kelompok tani, sebanyak 2 kelompok tani masing-masing kelompok tani 1 unit, yaitu:
      1) KT. Imbo Bonca Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar
      2) KUB Serikat Jaya Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara

c. Kabupaten Pelalawan 1 kelompok tani, yaitu KT. Rantau Jaya Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Seikijang
d. Kabupaten Rokan Hilir 1 kelompok tani, yaitu KT. SRDP Sido Makmur Desa Sintong Kec. Tanah Putih
e. Kabupaten Kepulauan Meranti 1 kelompok tani 2 unit, yaitu KT. Dwijaya Desa Dwi Tunggal Kecamatan Rangsang
f. Kabupaten Bengkalis 3 kelompok tani, sebanyak 3 kelompok tani masing-masing kelompok tani 1 unit, yaitu:
   1) KT. AL-Izzah Desa/Kelurahan Pakning Kecamatan Bukit Batu
   2) KT. Andalas Desa Buluh Apo Kecamatan Pinggir
   3) KT. Tunas Mekar Desa Pambang Baru Kecamatan Bantan

❖ **Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian**

Terdiri dari 1 kegiatan yaitu Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi dan 1 sub kegiatan, dengan anggaran (APBD-P) sebesar Rp. 105.999.751,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.97.264.065,- (91,76%) dan realisasi fisik sebesar 100 %. Adapun rincian sub kegiatan sebagai berikut :

a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

   Pelaksanaan kegiatan berupa Sosialisasi pengendalian Penyakit Jamur Akar Putih (JAP) pada tanaman Karet dan pemberian bantuan Agensia Pengendali Hayati (APH) berupa pupuk hayati *Trichoderma sp* seluas 100 Ha, pada kelompok tani Suka Maju (50 ha), Desa Kampung Baru, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kelompok Tani Mekar Jaya (50 ha), Desa Kepayang Sari, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu

❖ **Program Perizinan Usaha Pertanian**

Terdiri dari 1 kegiatan yaitu Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam daerah Kabupaten/Kota dan 1 sub kegiatan, dengan anggaran (APBD-P) sebesar Rp. 349.999.855,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.280.687.974,- (80,20%) dan realisasi fisik sebesar 100 %. Adapun rincian sub kegiatan sebagai berikut :

a. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian

Pelaksanaan kegiatan dengan membuat Pemetaan Perkebunan dengan mengidentifikasi Perkebunan besar dan rakyat serta melakukan validasi indikatif lahan Perkebunan >25 ha serta kepemilikannya. Dari hasil Pemetaan Perkebunan (Interpretasi Tenaga Ahli) diperoleh Indikatif Perkebunan Besar (>25 Ha) adalah seluas 2.345.941,80 Ha dan berdasarkan data perizinan pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau luas IUP/IUP-B adalah 1.513.919,53 Ha. Terhadap lahan perkebunan besar yang terindikasi non Izin (diluar IUP/IUP-B) telah dilakukan validasi kepemilikan lahan >25 Ha yang terindikasi non Izin pada 123 lokasi pada 6 (enam) Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Dumai dan Kota Pekanbaru, dengan hasil 49 lokasi milik perorangan (terdapat beberapa lokasi milik 1 orang), 16 lokasi milik kelompok masyarakat, 37 Lokasi milik perusahaan dan 14 lokasi yang indikasi kepemilikan lahan >25 Ha ternyata adalah perkebunan rakyat. Hasil validasi maupun indikatif Perkebunan besar non izin hasil Interpretasi Tenaga Ahli yg dibuat dalam Peta Perkebunan akan ditindaklanjuti dalam penertiban perizinan Perkebunan baik oleh Provinsi, Kabupaten/Kota, sehingga diharapkan menambah wajib pajak baru yang akan meningkatkan pendapatan daerah

❖ **Program Penyuluhan Pertanian**

Terdiri dari 3 kegiatan yaitu dan 3 sub kegiatan, dengan anggaran (APBD-P) sebesar Rp. 197.543.418,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.140.859.100,- (74,15%) dan realisasi fisik sebesar 100 %. Adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
   a. Sub. Kegiatan Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta

      Pelaksanaan pembinaan terhadap ketenagaan penyuluhan pertanian (PNS, Swadaya dan Swasta) dengan anggaran (APBD-P) sebesar Rp. 49.719.750,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.39.161.000,- (78,76%) dan realisasi fisik sebesar 100% yang bertujuan sebagai berikut :

      1) Meningkatkan kapasitas Sumberdaya Manusia penyuluh pertanian, Penyuluh Swadaya dan Swasta
      2) Meningkatkan kapasitas, peran dan fungsi BPP sebagai home base penyelenggaraan penyuluhan di kecamatan.
      3) Menumbuhkembangkan peran dan fungsi penyuluh pertanian swadaya dan swasta.

      Sub Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta melaksanakan pembinaan sebagai berikut :

      1) Pembinaan di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kepulauan Meranti
      2) Pembinaan di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi
      3) Pembinaan di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis
      4) Pembinaan di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu
      5) Pembinaan di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak
      6) Pembinaan di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan
      7) Pembinaan di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar

8) Pembinaan di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru

2. Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian

a. Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani

Pelaksanaan kegiatan ini berupa Pelatihan Teknis Budidaya Sagu di Kabupaten Bengkalis dengan peserta sebanyak 25 orang dengan memperhitungkan perwakilan peserta wanita sebanyak minimal 10 % dari jumlah peserta dan Pelatihan Teknis Budidaya Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 25 orang dengan memperhitungkan perwakilan peserta wanita sebanyak minimal 10 %. dengan anggaran (APBD-P) sebesar Rp. 55.131.028,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.46.204.300,- (83,81%) dan realisasi fisik sebesar 100

Adapun rincian peserta terpilah gender dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 15
Data Terpilah Gender

| No. | Kabupaten | Jenis Kelamin | | | Kelompok Umur | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P+L | P | L | <20 th | 20-34 th | >35 th |
| 1. | Indragiri Hilir | 25 | 6 | 19 | - | 9 | 16 |
| 2. | Bengkalis | 25 | 3 | 22 | - | 7 | 18 |
| Total | | 50 | 9 | 41 | - | 16 | 34 |

3. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan

a. Sub. Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani

Keluaran dari Sub Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Petani berupa pembinaan dan pendampingan pembentukan Korporasi Petani adalah Sosialisasi/ Pembinaan/Pelatihan/Bimtek mengenai koorporasi petani serta pembinaan Kelompok Tani/Gapoktan/KUD/BUMP komoditi kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 10 (sepuluh) orang dari 10 (sepuluh) kelompok tani dan Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 8 (delapan) orang dari 8 (delapan) kelompok tani, dengan anggaran (APBD-P) sebesar Rp. 92.692.640,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.55.493.800,- (59,87%) dan realisasi fisik sebesar 100%

Berikut tabel capaian kinerja Dinas Perkebunan Tahun 2022 berdasarkan target dan realisasi kegiatan sebagai berikut :

Tabel 16
Capaian Kinerja Dinas Perkebunan Tahun 2022
Berdasarkan Target Dan Realisasi Kegiatan

| KEBIJAKAN | | URAIAN PROGRAM (INDIKATOR) / KEGIATAN | | | TARGET | REALISASI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; | I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI<br>Indikator: Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Perkebunan | | 100% | 100% |
| 2 | Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025; | 1 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 100% | 100% |
| | | | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 103 Orang | 103 Orang (100%) |
| | | 2 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | 100% | 100% |
| 3 | Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024; | | 1 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 7 Laporan | 7 Laporan (100%) |
| | | 3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 100% | 100% |
| 4 | Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah Provinsi Riau; | | 1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 154 Paket | 154 Paket (100%) |
| | | 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 100% | 100% |
| | | | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 15 Jenis | 15 Jenis (100%) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024; | | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 30 Jenis | 30 Jenis (100%) |
| | | | 3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 3 Paket | 3 Paket (100%) |
| 6 | Peraturan Gubernur Riau No 62 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau; | | 4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 28 Jenis | 28 Jenis (100%) |
| | | | 5 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 137 Laporan | 137 Laporan (100%) |
| | | 5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 100% | 100% |
| | | | 1 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 28 Unit | 28 Unit (100%) |
| | | 6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100% | 103.68% |
| | | | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.051 Surat | 1.167 Surat (111,04%) |
| | | | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 13 Rekening | 13 Rekening(100%) |
| | | | 3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 924 OB | 924 OB (100%) |
| | | 7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100% | 85.19% |
| | | | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 13 Unit | 13 Unit (100%) |
| | | | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 18 Unit | 10 Unit (55,56%) |
| | | | 3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 Unit | 1 Unit (100%) |
| | | II | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN<br>Indikator: Jumlah Produksi Komoditas Utama Perkebunan | | 8.630.387 Ton | 9.227.178 Ton (106,91%) |
| | | 1 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | | 147.750 bibit | 137.450 bibit (93,02%) |
| | | | 1 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman/Bibit Perkebunan | 1 Laporan | 1 Laporan (100%) |
| | | III | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN<br>Indikator: Produktifitas Komoditas Utama Perkebunan | | 12.609 Kg/Ha/Th | 11.932 Kg/Ha/Th (94,63%) |
| | | 1 | Penataan Prasarana Pertanian | | 700 ha | 586 ha (83,71) |
| | | | 1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani | 3 Dokumen | 3 Dokumen (100%) |
| | | | 2 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | 1 Laporan | 1 Laporan (100%) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IV | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN<br>Indikator: Persentase Luas Penanganan Lahan Perkebunan yang Terdampak Bencana | | 0,1% | 0,15%<br>(150%) |
| | | 1 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi | | 0,1% | 0,15%(150%) |
| | | | 1 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 100 Ha | 100 Ha<br>(100%) |
| | | V | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN<br>Indikator: Persentase Usaha Perkebunan yang Memiliki Izin | | 66,95% | 64,53%<br>(96,38%) |
| | | 1 | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam daerah Kabupaten/Kota | | 1 Laporan | 1 Laporan<br>(100%) |
| | | | 1 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian | 1 Laporan | 1 Laporan<br>(100%) |
| | | VI | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN<br>Indikator: Persentase SDM yang Ditingkatkan Kompetensinya | | 1,78% | 1,81%<br>(101,68%) |
| | | 1 | Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian | | 80 Orang | 80 Orang<br>(100%) |
| | | | 1 | Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta | 80 Orang | 80 Orang<br>(100%) |
| | | 2 | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian | | 2 Kelompok | 2 Kelompok<br>(100%) |
| | | | 1 | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani | 2 Kelompok | 2 Kelompok<br>(100%) |
| | | 3 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan | | 1 Unit | 1 Unit<br>(100%) |
| | | | 1 | Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani | 1 Unit | 1 Unit<br>(100%) |
| | | | UPT PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN | | | |
| | | I | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN<br>Indikator: Jumlah Produksi Komoditas Utama Perkebunan | | 8.630.387 Ton | 9.227.178 Ton<br>(106,91%) |
| | | 1 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | | 15.000 bibit | 15.000 bibit<br>(100%) |
| | | | 1 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman/Bibit Perkebunan | 1 Laporan | 1 Laporan<br>(100%) |
| | | | UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN | | | |
| | | I | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN<br>Indikator: Jumlah Produksi Komoditas Utama Perkebunan | | 8.630.387 Ton | 9.227.178 Ton<br>(106,91%) |
| | | 1 | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | | 147.750 bibit | 137.450 bibit<br>(93,02%) |
| | | | 1 | Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih | 40.000 Sertifikat | 35,941,256 Sertifikat |

### 3.2.2 Anggaran APBN

Untuk pelaksanaan urusan perkebunan pada anggaran APBN dilaksanakan melalui alokasi dana Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi.

**1. DEKONSENTRASI**

Pelaksanaan sumber dana Dekonsentrasi, dengan pagu anggaran sebesar Rp.889.951.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.889.084.214,- atau sebesar 99,9 % Dan realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan terdiri dari 2 program yaitu :

a. Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri

Dukungan Perlindungan Perkebunan, dengan output kegiatan:

- Tersedianya data serangan OPT komoditi Perkebunan (Karet, kelapa, kelapa sawit, kopi) di Provinsi Riau
- Tersedianya data ramalan serangan OPT komoditi Perkebunan di Provinsi Riau

b. Program Dukungan Manajemen

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan, dengan output kegiatan :

- Adanya dokumen usulan program/kegiatan tahun 2023
- Adanya Buku Statistik Provinsi Riau tahun 2021 (n-1)
- Adanya laporan CALK
- Adanya laporan penatausahaan Barang Milik Negara

Adapun Realisasi pelaksanaan anggaran APBN Dana Dekonsentrasi alokasi dapat dilihat pada tabel 17 berikut :

Tabel 17
Realisasi Anggaran APBN Dinas Perkebunan Provinsi Riau
dana DEKONSENTRASI Tahun 2022

| No | Program Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi | | Realisasi Fisik (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Keu | % | |
| | **Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan** | | | | |
| 1 | Dukungan Perlindungan Perkebunan | 204.700.000 | 204.500.000 | 99,90 | 100 % |
| 2 | Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan | 685.251.000 | 684.584.214 | 99,90 | 100 % |
| | **Jumlah** | **889.951.000** | **889.084.214** | **99,9 %** | **100 %** |

## 2. TUGAS PEMBANTUAN

Pelaksanaan sumber dana Tugas Pembantuan (TP), dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.952.167.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 3.815.543.042,00,- atau sebesar 96,54 % Dan realisasi fisik sebesar 99,61%. Kegiatan terdiri dari 2 program yaitu :

a. Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri

Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar, dengan output kegiatan :

- Perluasan Tanaman Kelapa di Kab.Indragiri Hilir 100 Ha
- Peremajaan Tanaman Kelapa Kab. Indragiri Hilir 500 Ha
- Operasional Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun

b. Program Dukungan Managemen

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya, dengan output kegiatan :

- Dokumen registrasi 39 Kelompok UPPB (Kuansing, Kampar, Bengkalis, Dumai, Pelalawan, Rohil)
- Terbitnya 1.350 STDB pada 6 kab/kota (Dumai, Kampar, Siak, Rohul, Inhil)
- Terdatanya perizinan usaha perkebunan di Provinsi Riau
- Pengediaan mesin alat pengupas sabut kelapa 1 unit di Kab. Inhil
- Laporan rekomendasi benih tanaman perkebunan
- Pemeliharaan kebun sumber benih senyak 7 ha dan Blok Penghasil Tinggi dan Pohon Induk Terpilih sebanyak 23 ha

Adapun Realisasi pelaksanaan anggaran APBN Dana Tugas Pembantuan (TP) alokasi dapat dilihat pada tabel 18 berikut :

Tabel 18
Realisasi Anggaran APBN Dinas Perkebunan Provinsi Riau
dana TUGAS PEMBANTUAN Tahun 2022

| NO | NAMA PROGRAM/KEGIATAN | PAGU MURNI (Rp) | REALISASI KEUANGAN | |
|---|---|---|---|---|
| | | | (Rp) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6=5/4*100 |
| **018.05.EC** | **Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri** | **3.598.667.000** | **3.480.290.792,00** | **96,71** |
| 1777 | Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar | 1.578.000.000 | 1.546.673.750,00 | 98,01 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1779 | Penguatan Perlindungan Perkebunan | 254.500.000 | 253.127.830,00 | 99,46 |
| 5889 | Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan | 1.397.858.000 | 1.338.695.552,00 | 95,77 |
| 5890 | Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan | 368.309.000 | 341.793.660,00 | 92,80 |
| **018.05.WA** | **Program Dukungan Manajemen** | **353.500.000** | **335.252.250,00** | **94,84** |
| 1780 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan | 353.500.000 | 335.252.250,00 | 94,84 |
| **JUMLAH** | | **3.952.167.000,00** | **3.815.543.042,00** | **96,54** |

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi program/kegiatan sumber dana APBN yang telah dilakukan :

a. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian keberhasilan kinerja sumber dana APBN, sebagai berikut :
   - Konsolidasi internal pada bidang yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana telah dianggarkan di dalam POK, termasuk koordinasi antar bidang dengan arahan/petunjuk dari pimpinan.
   - Penyiapan dokumen administrasi pendukung dan melaksanakan pertemuan teknis secara kontinu.
   - Melakukan koordinasi dan penyampaian informasi kepada dinas terkait di kabupaten yang menjadi lokus pelaksanaan kegiatan.
   - Melakukan koordinasi dan konsultasi teknis kepada direktorat terkait di Kementerian Pertanian.

b. Permasalahan teknis yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja sumber dana APBN, sebagai berikut :
   - Terdapatnya beberapa kali revisi POK sehingga berdampak pada perecanaan pelaksanaan kegiatan khususnya belanja untuk pengadaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.
   - Pelaksanaan Registrasi UPPB ada 1 kelompok tani yang tidak tidak dapat dilakukan Registrasi karena Kelompok Tani tersebut tidak bisa mempersiapkan Dokumen Sistem Mutu (Doksistu) yaitu Kelompok Tani Sido Muncul Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis
   - Dari target 1.600 STDB ( Surat Tanda Daftar Budidaya ) di 6 Kab/Kota (Kampar,Bengkalis,Rokan Hulu, Dumai,Inhil,Siak), yang terealisasi sebanyak 1.374 Eksp STDB di 5 Kabupaten. Sedangkan

yang tidak terealisasi yaitu Kab. Bengkalis disebabkan terkendalanya pelimpahan wewenang penerbitan STDB dari Bupati Bengkalis kepada Kepala Dinas Perkebunan Kab.Bengkalis sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022, sehingga Kabupaten belum dapat menerbitkan STDB

c. Solusi yang dilakukan Dinas Perkebunan Provinsi Riau dalam mengatasi masalah yang dilaksanakan diantaranya :
   - Melakukan koordinasi dan konsultasi secara kontinu kepada direktorat terkait, baik secara langsung ke pusat maupun dengan sistem daring.
   - Melakukan koordinasi dan konsolidasi internal antar bidang terkait untuk upaya percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan.
   - Melakukan koordinasi dan penyampaian informasi secara kontinu ke dinas terkait di kabupaten, untuk membahas teknis pelaksanaan kegiatan.

Selain itu Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2022 memperoleh prestasi dianugerahi penghargaan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia atas komitmennya dalam menjalankan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dianugrahkan kepada Gubernur Riau dan diserahkan oleh Menteri Pertanian RI Bapak Syahrul Yasin Limpo kepada Gubernur Riau yang diwakili oleh Wakil Gubernur Riau Bapak Edy Natar bertempat di Hotel Pullman Jakarta pada hari Senin tanggal 27 Feberuari 2023, selain itu juga diberikan penghargaan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Bapak Ir. Zulfadli, dengan kategori award pemerintah Tingkat Provinsi terbaik

# BAB IV
# P E N U T U P

## 4.1 KESIMPUAN UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai wujud pertanggungjawaban tertulis Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2022 atas tingkat capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sebagai langkah perbaikan yang berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

Capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Riau tahun 2022 sumber dana APBD dengan realisasi fisik sebesar 99.67%, dan realisasi keuangan sebesar 93,87% dan realisasi sumber dana APBN-TP dengan realisasi fisik sebesar 99.61% dan realisasi keuangan sebesar 96,54% serta sumber dana APBN-DK dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,9%. Apabila dilihat dari persentase capaian kinerja, maka kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau dapat dikategorikan berhasil atau tercapai.

Capaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dengan 2 sasaran strategis dari IKU yang diperjanjikan yaitu sararan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan indikator persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran capaian realisasi kinerja Dinas Perkebunan dengan katagori kinerja *Sangat Tinggi*, ini berarti Dinas Perkebunan telah melaksanaan program dan kegiatan non urusan secara terukur dan jelas dengan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dengan telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), dan sasaran strategis peningkatan produksi komoditas utama perkebunan dengan indikator mengukur jumlah produksi utama tanaman perkebunan (data statistik tanaman perkebunan Angka Sementara / ASEM Tahun 2022) dengan capaian dengan katagori kinerja *Sangat Tinggi* dari target 8.630.387 ton telah tercapai 9.227.178 (106,91%)

Produktivitas tanaman perkebunan masih rendah, dimana produktivitas perkebunan masih dibawah produktivitas nasional. Hal ini juga mempengaruhi upaya pencapaian peningkatan produksi. Produktivitas tersebut masih dapat ditingkatkan dengan pemberian input teknologi atau pemanfaatan teknologi yang ada. Untuk itu dukungan kegiatan seperti penyediaan benih bermutu, penggunaaan pupuk yang sesuai, sarana dan prasarana yang memadai serta membangun keterampilan dan kemampuan petani dan petugas menjadi hal yang sangat penting.

Secara umum pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Urusan Dinas Perkebunan Tahun 2022 untuk sasaran strategis terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel mendapat nilai 68,03 dengan predikat B (Baik) dengan capaian sebesar 99,62% lebih tinggi dari pada Tahun 2021 dan indikator jumlah produksi komoditas utama perkebunan tahun 2022 berdasarkan data statistik perkebunan Angka Sementara (ASEM), capaian kinerja produksi kelapa sawit dan produksi sagu melebihi target akhir Renstra, dan untuk capaian produksi kelapa dan karet tidak mencapai target. Hal ini berarti perlu upaya yang nyata untuk mencapai target yang telah ditetapkan, guna peningkatan produksi tanaman perkebunan dengan melakukan peremajaan, intensifikasi dan diversifikasi tanaman perkebunan.

## 4.2 LANGKAH STRATEGIS YANG AKAN DILAKUKAN OLEH OPD UNTUK MENINGKATKAN KINERJA MASA MENDATANG

Agar pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Riau dapat dilaksanakan sesuai yang telah direncanakan yang tercantum dalam Renstra maka langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang sebagai berikut :

1. **Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal, berdaya saing dan bernilai tambah tinggi untuk kesejahteraan pekebun;**

   Strategi pengembangan komoditas unggulan perkebunan kedepan perlu ditekankan, diintensifkan dan difokuskan pada peningkatan kualitas komoditas unggulan baik pada penerapan teknologi produksi,

teknologi pascapanen, efisiensi biaya produksi, standarisasi mutu, pengolahan sampai dengan pemasaran. Pemberdayaan pekebun dengan fokus pembinaan, pendampingan dan pelatihan kelompok tani dalam optimalisasi komoditas unggulan daerah perlu dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat pekebun secara berjenjang dan berkelanjutan agar terwujud komoditas unggulan daerah yang berkualitas, tangguh dan mampu bersaing dalam era pasar bebas baik pasar global maupun pasar ASEAN. Selain itu aspek penyuluhan akan memegang peranan penting dalam peningkatan kapasitas pengetahuan dan inovasi petani/pekebun.

2. **Memperkokoh fondasi sistem pertanian bio-industri berkelanjutan;**
   Pemenuhan penyediaan bahan baku bioenergi dan pengembangan pondasi sistem pertanian bio-industri dengan fokus pengembangan komoditas kelapa sawit baik melalui kegiatan budidaya dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas maupun melalui kegiatan integrasi tanaman perkebunan dengan ternak dan tumpang sari dengan komoditas pertanian lainnya

3. **Peningkatan kompetensi SDM aparatur / petani**
   Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia baik aparatur maupun petani sebagai pelaku usaha melalui peningkatan kompetensi petugas/petani dan kelembagaan guna meningkatkan usaha agribisnis yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha dan kelembagaan agribisnis tanaman perkebunan guna peningkatan budaya usaha tani yang maju dan berkelanjutan

4. **Peningkatan kualitas pelayanan internal OPD (bersih, transparan, dan akuntabel)**
   Strategi peningkatan pelayanan internal OPD yang bersih, transparan dan akuntabel diarahkan pada peningkatan pelayanan publik bidang perkebunan secara akuntabel, profesional guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengoptimalkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan Provinsi Riau ini, dan diharapkan dapat dijadikan sebagai

perbaikan dan penyempurnaan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta alat komunikasi dalam memberikan informasi akuntabilitas pelaksanaan kegiatan kedepannya. Berbagai hal kedala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan anggaran tahun 2022 agar dijadikan bahan evaluasi guna membangun komitmen dalam memberikan hasil yang berkualitas bagi peningkatan kinerja selanjutnya.

Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana secara berkesinambungan oleh para pimpinan sehingga akan diperoleh pencapaian target program dan kegiatan sebagai upaya peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang

Pekanbaru, Januari 2023
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau

Ir. ZULFADLI
Pembina Utama Madya
NIP. 19660803 199211 1 001



Dipindai dengan CamScanner

# LAMPIRAN

# PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
# PERANGKAT DAERAH
# PROVINSI RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. ZULFADLI
Jabatan : KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SYAMSUAR
Jabatan : GUBERNUR RIAU
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, November 2022

**Pihak Kedua,**

GUBERNUR RIAU

SYAMSUAR

**Pihak Pertama,**

PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PERKEBUNAN

ZULFADLI
Pembina Utama madya
NIP. 19660803 199211 1 001

Dipindai dengan CamScanner

# PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
# DINAS PERKEBUNAN
# PROVINSI RIAU

**BERDASARKAN PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2019-2024**

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel | Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD | 68,29 (B) |
| 2. | Terwujudnya peningkatan produksi tanaman perkebunan | Jumlah produksi komoditas utama perkebunan,dengan rincian sbb : | 8.630.387 |
| | | * *Kelapa sawit (ton CPO)* | 7.541.787 |
| | | * *Kelapa (ton kopra)* | 396.500 |
| | | * *Karet (ton karet kering)* | 426.600 |
| | | * *Sagu (ton tepung sagu)* | 265.500 |

| | PROGRAM | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Rp | 23,815,074,383 |
| 2. | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Rp | 1,992,922,835 |
| 3. | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Rp | 1,316,901,584 |
| 4. | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana | Rp | 105,999,751 |
| 5. | Program Perizinan Usaha Pertanian | Rp | 349,999,855 |
| 6. | Program Penyuluhan Pertanian | Rp | 197,543,418 |
| | **TOTAL APBD** | **Rp** | **27,778,441,826** |
| | **DEKONSENTRASI** | **Rp** | **889,951,000** |
| 1. | Program Dukungan Perlindungan Perkebunan | Rp | 204,700,000 |
| 2. | Program Dukungan Manajemen | Rp | 685,251,000 |
| | **TUGAS PEMBANTUAN** | **Rp** | **3,952,167,000** |
| 1. | Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri | Rp | 3,598,667,000 |
| 2. | Program Dukungan Manajemen | Rp | 353,500,000 |
| | **TOTAL APBN** | **Rp** | **4,842,118,000** |

Pekanbaru, November 2022

GUBERNUR RIAU

GUBERNUR RIAU

**SYAMSUAR**

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU

PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PERKEBUNAN

**Ir. ZULFADLI**
Pembina Utama Madya
NIP.19660803 199211 1 001

Dipindai dengan CamScanner

# PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
# PERANGKAT DAERAH
# PROVINSI RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. ZULFADLI
Jabatan : KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SYAMSUAR
Jabatan : GUBERNUR RIAU
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, November 2022

**Pihak Kedua,**

GUBERNUR RIAU

SYAMSUAR

**Pihak Pertama,**

PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PERKEBUNAN

ZULFADLI
Pembina Utama madya
NIP. 19660803 199211 1 001

Dipindai dengan CamScanner

# PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
# DINAS PERKEBUNAN
# PROVINSI RIAU

**BERDASARKAN PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2019-2024**

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel | Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD | 68,29 (B) |
| 2. | Terwujudnya peningkatan produksi tanaman perkebunan | Jumlah produksi komoditas utama perkebunan,dengan rincian sbb : | 8.630.387 |
| | | * *Kelapa sawit (ton CPO)* | 7.541.787 |
| | | * *Kelapa (ton kopra)* | 396.500 |
| | | * *Karet (ton karet kering)* | 426.600 |
| | | * *Sagu (ton tepung sagu)* | 265.500 |

| | PROGRAM | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Rp | 23,815,074,383 |
| 2. | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Rp | 1,992,922,835 |
| 3. | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Rp | 1,316,901,584 |
| 4. | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana | Rp | 105,999,751 |
| 5. | Program Perizinan Usaha Pertanian | Rp | 349,999,855 |
| 6. | Program Penyuluhan Pertanian | Rp | 197,543,418 |
| | **TOTAL APBD** | **Rp** | **27,778,441,826** |
| | **DEKONSENTRASI** | **Rp** | **889,951,000** |
| 1. | Program Dukungan Perlindungan Perkebunan | Rp | 204,700,000 |
| 2. | Program Dukungan Manajemen | Rp | 685,251,000 |
| | **TUGAS PEMBANTUAN** | **Rp** | **3,952,167,000** |
| 1. | Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri | Rp | 3,598,667,000 |
| 2. | Program Dukungan Manajemen | Rp | 353,500,000 |
| | **TOTAL APBN** | **Rp** | **4,842,118,000** |

Pekanbaru, November 2022

GUBERNUR RIAU

GUBERNUR RIAU

**SYAMSUAR**

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU

PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PERKEBUNAN

**Ir. ZULFADLI**
Pembina Utama Madya
NIP.19660803 199211 1 001

Dipindai dengan CamScanner